



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyertaan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional;
- d. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/4282/Keuda tanggal 9 Maret 2022 Perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyertaan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kemen PANRB.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
13. Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana/JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
14. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
16. Sistem Evaluasi berdasarkan Faktor Jabatan (*Factor Evaluation System*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor - faktor jabatan.
17. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
18. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
19. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
20. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
22. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
23. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
24. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
25. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat

- penilai terhadap SKP dan perilaku kerja pegawai dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
26. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
 27. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 29. Indeks Prestasi Kerja adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan penilaian prestasi kerja.
 30. Indeks Kedisiplinan yang selanjutnya disebut ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.
 31. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 32. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh dari penilaian SKP dan tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 33. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
 34. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
 35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 36. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
 37. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
 38. Penjabat adalah Pegawai ASN yang diangkat dalam struktur jabatan ASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Penghasilan Pegawai ASN dan sebagai acuan

bagi setiap Penghasilan Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 3

Ketentuan hari kerja dari Senin s/d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut:

- a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 08.00 s/d 16.30 Wita;
- b. hari Jum'at dari Pukul 08.00 s/d 11.30 Wita; dan
- c. setiap hari diwajibkan Apel Pagi dan Apel Siang, kecuali hari Jum'at kegiatan Senam Pagi dan Apel Siang.

BAB IV PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang sedang menjalani izin belajar karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
 - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal dimana pembinaan karir dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN terhitung setelah 2 (dua) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); dan
 - e. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintahan Daerah dan dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - b. Pegawai ASN titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan; dan
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tanpa dikenakan sanksi pemotongan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
 - b. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan;

- c. Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan dengan disertai surat keterangan dari dokter/bidan pemerintah serta ditetapkan dengan surat izin cuti; atau
 - d. Pegawai ASN yang mengambil cuti tahunan dan/atau tidak lebih 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) TPP ASN diberikan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 5

Besaran Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator menerima TPP sebesar atau sama dengan nominal TPP jabatan pengawas (eselon IVa) sebelumnya yang disederhanakan pada SKPD tempat bersangkutan bertugas;
- (3) Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang tidak ditunjuk sebagai Sub Koordinator menerima pengurangan TPP total sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP jabatan pengawas (eselon IVa) pada kelas jabatan yang bersangkutan;
- (4) Pelaksana/JFT selain hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator diberikan TPP ASN Tambahan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP jabatan yang bersangkutan;
- (5) Pelaksana/JFT selain hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator sekaligus sebagai PPTK diberikan TPP sebesar nominal TPP pada jabatan Pengawas (eselon IVa) sebelumnya yang disederhanakan pada SKPD tempat bersangkutan bertugas.
- (6) Pemberian TPP ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan TPP ASN Tambahan, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:

- a. Penjabat Sekretaris Daerah;
- b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
- c. Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
- d. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi selaku PPKD;
- e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah;
- f. Pejabat Penatausahaan Barang;
- g. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- h. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara SKPD;
- i. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Verifikator selaku pembantu PPK;
- j. Ajudan atau Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
 - 1) Ajudan Bupati;
 - 2) Ajudan Wakil Bupati;
 - 3) Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - 4) Ajudan Sekretaris Daerah.
- k. Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
 - 1) Sopir Bupati;
 - 2) Sopir Wakil Bupati;
 - 3) Sopir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4) Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - 5) Sopir Sekretaris Daerah.
- l. Petugas Pengawalan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- m. Tim Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- n. Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- o. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- p. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- q. Pengurus Barang SKPD dan Pengurus Barang PPKD;
- r. Bendahara Pengeluaran PPKD pada BPKAD;
- s. Bendahara Penerimaan PPKD pada BPKAD dan Bendahara Penerimaan pada Bapenda;
- t. Pembantu Bendahara;
- u. Bendahara Penerimaan SKPD;
- v. Pembantu Pengurus Barang pada SKPD dan Pembantu Pengurus Barang PPKD;
- w. Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah;
- x. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- y. Pembantu Bendahara Penerimaan;
- z. Kuasa Hukum Litigasi;
- aa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- bb. Pejabat Pengadaan; dan
- cc. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak lintas SKPD.

- (7) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan TPP ASN Tambahan sebesar pagu TPP Sekretaris Daerah.
- (8) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c menerima TPP ASN yang lebih tinggi dan diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang diterima.
- (9) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (10) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (11) Pegawai ASN yang melaksanakan fungsi selaku PPKD, Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, huruf e dan huruf f diberikan TPP ASN Tambahan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (12) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g sampai dengan huruf p diberikan TPP ASN tambahan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (13) TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) untuk Pegawai ASN yang diberi jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g sampai dengan huruf k diberikan dengan menggunakan pagu TPP tertinggi.
- (14) Ketentuan TPP ASN Tambahan untuk tim atau pengelola berlaku paling banyak 2 (dua) tim atau pengelola.
- (15) Tim atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (14) adalah Tim atau pengelola sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati ini.
- (16) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf q, huruf r, dan huruf s diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan.
- (17) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf t diberikan TPP ASN Tambahan berdasarkan pagu SKPD, dengan ketentuan:
 - a. pagu dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN;
 - b. pagu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN; atau

- c. pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (tiga puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (18) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf u sampai dengan huruf y diberikan TPP ASN Tambahan berdasarkan kelas jabatan, dengan ketentuan:
- Pegawai ASN dengan kelas jabatan 7 (tujuh) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN;
 - Pegawai ASN dengan kelas jabatan 6 (enam) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN; dan
 - Pegawai ASN dengan kelas jabatan 5 (lima) ke bawah diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN.
- (19) Terhadap Kuasa Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf z diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) atas setiap gugatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (20) TPP ASN Tambahan yang diberikan atas Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) didasarkan pada Surat Kuasa dan disertai laporan atas setiap gugatan di setiap bulannya.
- (21) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf aa diberikan TPP ASN Tambahan berdasarkan setiap kasus yang sampai ke Pengadilan dengan dibuktikan adanya Putusan Pengadilan dengan ketentuan:
- Pegawai ASN dengan kelas jabatan 9 (sembilan) keatas diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN;
 - Pegawai ASN dengan kelas jabatan 8 (delapan) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN;
 - Pegawai ASN dengan kelas jabatan 7 (tujuh) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN; dan
 - Pegawai ASN dengan kelas jabatan 6 (enam) kebawah diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (22) Terhadap Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf bb diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (23) Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf cc diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan.
- (24) Terhadap Pegawai ASN yang menduduki jabatan Bendahara tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pembantu Bendahara dan Verifikator.
- (25) TPP ASN Tambahan dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan Desember.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 7

Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. kelas jabatan;
- b. IFKD;
- c. IKK; dan
- d. IPPD.

Pasal 8

- (1) Besaran *basic* TPP ASN yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

$$\text{Basic TPP ASN} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{IKFD}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPPD})$$

- (2) $\text{IKFD} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} = 0,70 \times 0,87, \times 1,00 = 0,6095$.
- (3) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
Besaran Tunjangan BPK x 0,6095.
- (4) Daftar besaran TPP ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Besaran *basic* TPP ASN digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP ASN dengan kriteria:
- a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN didasarkan pada beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
 - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (3) Pemberian TPP ASN didasarkan prestasi kerja sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau tupoksinya atau inovasi yang diakui ditingkat nasional;
 - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan 20% (dua puluh persen) besaran TPP ASN yang diterima dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh Atasan Langsung Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) Pemberian TPP ASN didasarkan kondisi kerja sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif;
 - 3) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) Pekerjaan berisiko pada aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5) Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 6) Pekerjaan yang atau tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan strukturalnya.
 - c. selain rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud huruf b, terhadap Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Unit Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan kondisi kerja.
- (5) Pemberian TPP ASN didasarkan kelangkaan profesi sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - 2) kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - b. diberikan TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintahan;
 - c. alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN;
 - d. kelangkaan profesi diantaranya adalah:
 - 1) Sekretaris Daerah;
 - 2) Dokter Spesialis;
 - 3) Fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4) Fungsional Pemeriksa (auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD));
 - 5) Penguji Kendaraan Bermotor (PKB);
 - 6) Instruktur pada Balai Latihan Kerja;
 - 7) Penera.
- (6) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Penilaian TPP ASN

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Indeks Kedisiplinan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. Indeks Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Indeks penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendapatkan nilai sangat baik diukur dengan jumlah kegiatan dalam aplikasi e-Kita yang ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) kegiatan pada setiap bulan.

Bagian Keempat
Klasifikasi SKPD dan Perhitungan Besaran *Basic* TPP ASN

Paragraf 1
Klasifikasi SKPD

Pasal 11

- (1) TPP ASN diberikan dengan memperhatikan Klasifikasi SKPD.
- (2) Klasifikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kelas dan nilai jabatan pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala SKPD.
- (3) Klasifikasi SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Klasifikasi I : SKPD yang kelas jabatan 15 (lima belas) dengan nilai jabatan 3.555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala SKPD;
 - b. Klasifikasi II : SKPD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 3.030 (tiga ribu tiga puluh) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala SKPD;
 - c. Klasifikasi III : SKPD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala SKPD; dan
 - d. Klasifikasi IV : SKPD yang kelas jabatan 13 (tiga belas) dengan nilai jabatan 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) dan SKPD yang kelas jabatan 12 (dua belas) dengan nilai jabatan 2.315 (dua ribu tiga ratus lima belas) pada Kepala SKPD.
- (4) Kelurahan dengan kelas jabatan 9 (sembilan) dengan harga jabatan 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) dimasukkan pada kelompok klasifikasi IV.
- (5) Pengklasifikasian SKPD bersifat dinamis.

Pasal 12

Klasifikasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. SKPD Klasifikasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a adalah Sekretariat Daerah.
2. SKPD Klasifikasi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b adalah:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Badan Pendapatan Daerah.
3. SKPD Klasifikasi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c adalah:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Pariwisata;
 - h. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - j. Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - l. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - q. Dinas Sosial;
 - r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan; dan
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
4. SKPD Klasifikasi IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d adalah:
 - a. BPBD;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan.
5. Besaran TPP ASN untuk Pegawai ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disetarakan dengan TPP ASN pada SKPD Klasifikasi II.

Paragraf 2
Perhitungan Besaran *Basic* TPP ASN

Pasal 13

Perhitungan Besaran *basic* TPP ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi I :
 - a. Pejabat Struktural :
 1. Beban Kerja : 100 %.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 15 : 60%.
 - b) Kelas 14 : 55%.
 - c) Kelas 13 : 55%.
 - d) Kelas 12 : 50%.
 - e) Kelas 11 : 50%.
 - f) Kelas 9 : 45%.
 - g) Kelas 8 : 45%.
 3. Kelangkaan Profesi : 100% (Sekretaris Daerah)
 - b. Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan sebagai Sub Koordinator:
 1. Beban Kerja : 100%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 12 : 50%.
 - b) Kelas 11 : 50%.
 - c) Kelas 10 : 45%.
 - d) Kelas 9 : 45%.
 - e) Kelas 8 : 45%.
 - c. Pejabat Fungsional (JFT PBJ):
 1. Beban Kerja : 100%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : 40%.
 - b) Kelas 9 : 40%.
 - c) Kelas 8 : 40%.
 3. Kelangkaan Profesi :
 - a) Kelas 11 : 40%.
 - b) Kelas 9 : 40%.
 - c) Kelas 8 : 40%.
 - d. Pelaksana (JFU) :
 1. Beban Kerja : 95%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : 35% (khusus bendahara).
 - b) Kelas 6 : -
 - c) Kelas 5 : -
 - d) Kelas 4 : -
 - e) Kelas 3 : 35%.
 - f) Kelas 2 : -
 - g) Kelas 1 : 35%.
- 2) A. Klasifikasi II : Inspektorat
 - a. Pejabat Struktural :
 1. Beban Kerja : 100 %.

2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 14 : 52,5%.
 - b) Kelas 12 : 47,5%.
 - c) Kelas 11 : 47,5%.
 - d) Kelas 9 : 42,5%.
 - e) Kelas 8 : 42,5%.
 - b. Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan sebagai Sub Koordinator:
 1. Beban Kerja : 100 %.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 12 : 47,5%.
 - b) Kelas 11 : 47,5%.
 - c) Kelas 10 : 42,5%.
 - d) Kelas 9 : 42,5%.
 - e) Kelas 8 : 42,5%.
 - c. Pejabat Fungsional Pemeriksa:
 1. Beban Kerja : 95%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : 35%.
 - b) Kelas 9 : 35%.
 - c) Kelas 8 : 35%.
 - d) Kelas 7 : 35%.
 - e) Kelas 6 : 35%.
 - f) Kelas 5 : 35%.
 3. Kelangkaan Profesi :
 - a) Kelas 11 : 35%.
 - b) Kelas 9 : 35%.
 - c) Kelas 8 : 35%.
 - d) Kelas 7 : 35%.
 - e) Kelas 6 : 35%.
 - f) Kelas 5 : 35%.
 - d. Pelaksana (JFU) :
 1. Beban Kerja : 95%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : 30% (khusus bendahara).
 - b) Kelas 6 : -
 - c) Kelas 5 : -
 - d) Kelas 4 : -
 - e) Kelas 3 : 30%.
 - f) Kelas 2 : -
 - g) Kelas 1 : 30%.
- B. Klasifikasi II :
- a. Pejabat Struktural :
 1. Beban Kerja : 100%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 14 : 50%.
 - b) Kelas 12 : 45%.
 - c) Kelas 11 : 45%.

- d) Kelas 9 : 40%.
 - e) Kelas 8 : 40%.
 - b. Pejabat Fungsional Perencana/Pranata Komputer/Fungsional lainnya:
 - 1. Beban Kerja : 95 %.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : 30%.
 - b) Kelas 9 : 30%.
 - c) Kelas 8 : 10%.
 - d) Kelas 7 : 10%.
 - e) Kelas 6 : 10%.
 - f) Kelas 5 : 10%.
 - c. Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan tidak sebagai Sub Koordinator:
 - 1. Beban Kerja : 95 %.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 12 : 30%.
 - b) Kelas 11 : 30%
 - c) Kelas 10 : 25%.
 - d) Kelas 9 : 25%.
 - e) Kelas 8 : 25%.
 - e. Pelaksana (JFU) :
 - 1. Beban Kerja : 95%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : 30% (khusus bendahara).
 - b) Kelas 6 : -
 - c) Kelas 5 : -
 - d) Kelas 4 : -
 - e) Kelas 3 : 30%.
 - f) Kelas 2 : -
 - g) Kelas 1 : 30%.
- 3) Klasifikasi III :
- a. Pejabat Struktural :
 - 1. Beban Kerja : 100%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 14 : 40%.
 - b) Kelas 12 : 35%.
 - c) Kelas 11 : 35%.
 - d) Kelas 9 : 30%.
 - e) Kelas 8 : 30%.
 - b. Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan sebagai Sub Koordinator:
 - 1. Beban Kerja : 100%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 12 : 35%.
 - b) Kelas 11 : 35%.
 - c) Kelas 10 : 30%.
 - d) Kelas 9 : 30%.
 - e) Kelas 8 : 30%.

- c. Pejabat Fungsional (JFT) :
 - 1. Beban Kerja : 90%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : 5%.
 - b) Kelas 9 : 5%.
 - c) Kelas 8 : 5%.
 - d) Kelas 7 : 5%.
 - e) Kelas 6 : 5%.
 - f) Kelas 5 : 5%.
 - 3. Kelangkaan Profesi : -
 - d. Pelaksana (JFU) :
 - 1. Beban Kerja : 90%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : 25% (khusus bendahara).
 - b) Kelas 6 : -
 - c) Kelas 5 : 25% (khusus pengemudi VIP dan Pemadam Kebakaran).
 - d) Kelas 4 : -
 - e) Kelas 3 : 25%.
 - f) Kelas 2 : -
 - g) Kelas 1 : 25%.
- 4) Klasifikasi IV :
- a. Pejabat Struktural :
 - 1. Beban Kerja : 100 %.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 13 : 35%.
 - b) Kelas 12 : 35%.
 - c) Kelas 11 : 30%.
 - d) Kelas 9 : 20%.
 - e) Kelas 8 : 20%.
 - b. Pejabat Fungsional (JFT):
 - 1. Beban Kerja : 85 %
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : -
 - b) Kelas 9 : -
 - c) Kelas 8 : -
 - d) Kelas 7 : -
 - e) Kelas 6 : -
 - f) Kelas 5 : -
 - 3. Kelangkaan Profesi : -
 - c. Pelaksana (JFU) :
 - 1. Beban Kerja : 85%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : 15% (khusus bendahara).
 - b) Kelas 6 : -
 - c) Kelas 5 : 15% (khusus Pemadam Kebakaran).
 - d) Kelas 4 : -
 - e) Kelas 3 : 15%.

- f) Kelas 2 : -
- g) Kelas 1 : 15%.

Bagian Kelima
Penilaian SKP

Pasal 14

- (1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui SKP bulanan.
- (2) Penilaian tingkat kedisiplinan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sesuai ID Pegawai ASN dengan menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran (*finger print*), kecuali Fungsional Penyuluh maka absensi dilakukan secara manual dan bagi yang cacat fisik pada sidik jari maka menggunakan PIN atau Kode.
- (3) Penilaian tingkat kedisiplinan dengan menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran (*finger print*) dikecualikan bagi:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
 - 1) Ajudan dan sopir Pimpinan Daerah;
 - 2) Ajudan dan sopir Pimpinan DPRD; dan
 - 3) Ajudan dan sopir Sekretaris Daerah.
- (4) Apabila terjadi kerusakan perangkat elektronik pencatat kehadiran (*finger print*) maka:
 - a. ID Pegawai ASN dihitung secara manual;
 - b. SKPD membuat laporan tertulis ke Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyelesaikan perbaikan kerusakan pada perangkat elektronik pencatat kehadiran (*finger print*); dan
 - d. selama perbaikan belum dapat diselesaikan, maka ID dihitung secara manual.
- (5) Dalam hal terjadi gangguan pada aplikasi lebih dari 14 (empat belas) hari yang menyebabkan tidak dapat melakukan input atas kinerja maka laporan kinerja/SKP bulanan disampaikan secara manual dan nominal TPP ASN yang dibayar *flat* berdasarkan pagu TPP ASN.
- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b wajib melakukan inputan atas laporan kinerja/SKP bulanan secara manual.
- (7) SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dicetak (*print*) dan ditandatangani oleh atasan langsung masing-masing untuk dilampirkan pada saat pengamprahan TPP ASN setiap bulannya.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP ASN BAGI CPNS DAN PPPK

Bagian Kesatu
Pembayaran TPP ASN Bagi CPNS

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai jabatan fungsional sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah dari jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran TPP Bagi PPPK

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN selama jangka waktu setahun pertama sebagai PPPK.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP memasuki tahun kedua dan seterusnya sebagai PPPK.

BAB VII
PENYUSUNAN SKP

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai ASN pemangku Jabatan Struktural dan pemangku Jabatan Fungsional wajib menyusun SKP tahunan dan bulanan.
- (2) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyusunan SKP Tahunan dibuat pada awal bulan Januari dan pengisian realisasi dibuat pada akhir bulan Desember; dan
 - b. penyusunan SKP bulanan dibuat pada awal bulan dan pengisian realisasi pada setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 18

- (1) Rekapitulasi Hasil Penilaian SKP dan Tingkat Kedisiplinan Pegawai ASN disusun oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian dan disahkan oleh Kepala SKPD sebagai dasar pembayaran TPP ASN.
- (2) Dokumen rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bahan evaluasi.

Pasal 19

Pedoman penyusunan SKP Pegawai ASN dan Format SKP tahunan dan bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
INDEKS TINGKAT KEDISIPLINAN

Pasal 20

- (1) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi pengukuran terhadap:
 - a. hadir terlambat;
 - b. pulang lebih cepat; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sampai dengan hari Kamis diberlakukan:
 - 1) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - 2) saat pulang kerja mulai pukul 16.30 WITA sampai dengan 19.00 WITA.
 - b. pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 - 1) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - 2) saat pulang kerja mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.
 - c. pengukuran tingkat kedisiplinan bagi SKPD yang memberlakukan sistem kerja *shift* dibuktikan dengan surat tugas;
 - d. apabila terdapat kegiatan kerja lapangan atau kegiatan acara yang tidak memungkinkan untuk melakukan absen sidik jari baik berangkat maupun pulang, maka bukti kehadiran harus dilampiri dengan surat tugas;
 - e. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas yang dilengkapi dengan surat tugas, ID Pegawai ASN dalam aplikasi perangkat elektronik kehadiran (*finger print*) tetap dianggap masuk kerja; dan

- f. bagi Penjabat Sementara Kepala Desa yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten atau luar Kabupaten baik dalam provinsi maupun luar provinsi dapat membuat surat tugas menggunakan jabatan utama sebagai Pegawai ASN, maka ID Pegawai ASN dalam aplikasi perangkat elektronik kehadiran (*finger print*) tetap dianggap masuk kerja dan tidak mendapat potongan TPP ASN.

BAB IX PEMBERIAN IZIN, TOLERANSI, DAN PEJABAT PEMBERI IZIN

Pasal 21

Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja dikarenakan oleh kepentingan keluarga, sakit, dan perihal lain yang bisa dipertanggungjawabkan maka kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Pasal 22

- (1) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk kepentingan diluar kedinasan, diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Izin yang telah diambil akan mengurangi hak cuti Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Izin sakit maksimal 3 (tiga) hari disertai dengan surat keterangan dokter tidak mengurangi hak cuti dan TPP ASN.
- (4) Izin sakit lebih dari 3 (tiga) hari dan tidak menjalani rawat inap disertai dengan surat keterangan dokter untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, maka dilakukan pemotongan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70% (tujuh puluh persen) kinerja dibayar plat.
- (5) Izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70% (tujuh puluh persen) kinerja dibayar plat.
- (6) Izin sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit.

Pasal 23

- (1) Izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan.
- (2) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.
- (3) Izin disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan izin.

- (4) Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka izin tertulis dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.
- (5) Format surat izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 24

- (1) Pengajuan SPM pembayaran TPP ASN berdasarkan atas rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) setiap bulan dapat diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (2) Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 dan bulan ke-14 berpedoman pada peraturan tentang THR dan tunjangan ke-13, dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (3) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (4) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke BPKAD mulai tanggal 15 bulan Desember.
- (5) Rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan disertai lampiran yang menjadi bahan pertanggungjawaban.
- (6) Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (7) Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan kepada Kepala SKPD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.

- (10) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan dengan:
- a. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima TPP ASN; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran SKPD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran SKPD memindahbukukan ke rekening penerima TPP ASN.

BAB XI KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 25

- (1) SKPD memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menyampaikan laporan:
- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
 - b. Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun;
 - c. Laporan kinerja bulanan;
 - d. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - e. Surat Permintaan Pengesahan Belanja BOS beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Semesteran;
 - f. Laporan LHKPN dan LHKASN.
 - g. Laporan Kinerja (LKj) tahunan;
 - h. Laporan Reformasi Birokrasi triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - i. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semesteran dan tahunan;
 - j. Laporan Dana Alokasi Khusus;
 - k. Laporan Penerimaan Gratifikasi;
 - l. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - m. Laporan Barang Milik Daerah; dan
 - n. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja JKN dan BLUD beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja.
- (2) SKPD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.
- (3) Sanksi yang dijatuhkan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sanksi untuk pejabat struktural.
- (4) Sanksi untuk pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengurangan 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap laporan dari TPP ASN yang diberikan terhadap seluruh pejabat struktural pada SKPD yang dijatuhkan sanksi, sampai dengan terpenuhinya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dikecualikan laporan untuk LHKPN, LHKASN, dan Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dikarenakan bersifat personal pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total TPP ASN yang diterima diberlakukan bagi pejabat Tinggi pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana yang tidak melaporkan sampai batas waktu yang ditentukan.

- (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap TPP ASN bulan berikutnya, dan apabila belum juga menyampaikan lebih dari waktu yang ditetapkan maka dikenakan penundaan pembayaran TPP ASN sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dimaksud.
- (7) Bagi ASN yang diundang/ditunjuk/ditugaskan mengikuti kegiatan Manunggal Tuntung Pandang berhalangan hadir tanpa keterangan jelas, maka diberikan potongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari 30% (tiga puluh persen) absensi dalam setiap kegiatan Manunggal Tuntung Pandang dengan absensi sebanyak 1 (satu) kali.
- (8) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara resmi dan apel pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (10) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti upacara resmi dan apel pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (11) Bagi Pegawai ASN yang terbukti menggunakan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi akan dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP ASN yang diterima selama satu bulan.

BAB XII

BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dikarenakan wabah/virus, maka penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran (*finger print*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditiadakan, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat terjadi wabah/virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai ASN dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal masing-masing (WFH) termasuk isolasi mandiri.
- (3) Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan pemantauan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu terhadap:
 - a. Ajudan dan Sopir Bupati;
 - b. Ajudan dan Sopir Wakil Bupati;
 - c. Ajudan dan Sopir Pimpinan DPRD; dan
 - d. Ajudan dan Sopir Sekretaris Daerah.

BAB XIII PENGANGGARAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka SKPD dapat menganggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, terhitung sejak diundangkan dengan membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan bagi Pejabat Struktural eselon IVa dengan kualifikasi kelas jabatan 8 (delapan) untuk ditempatkan pada kualifikasi kelas jabatan 9 (Sembilan) adalah apabila di dalam Peta Jabatan terdapat Jabatan Pelaksana.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan adanya perbedaan formulasi yang digunakan dalam perhitungan besaran TPP ASN per rekening pada DPA SKPD dengan perhitungan besaran TPP ASN per rekening pada Peraturan Bupati ini, maka besaran pagu TPP ASN per masing-masing Pegawai ASN per kelas jabatan dibayarkan melalui rekening belanja yang telah tercantum dalam dokumen pelaksana anggaran masing-masing SKPD.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- (3) Dengan adanya perubahan kriteria pemberian TPP ASN maka aplikasi *My TPP* dilakukan penyesuaian, selama masa penyesuaian aplikasi dimaksud maka pembayaran TPP ASN bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret Tahun 2022 dibayarkan secara *flat* berikut TPP ASN Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (4) Pengajuan SPM atas pembayaran TPP ASN bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari ketentuan Pasal 24 ayat (1).
- (5) SKP untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret Tahun 2022 tetap dilakukan penginputan pada aplikasi e-Kita.
- (6) Dalam Penentuan Kelas jabatan Pembayaran TPP berpedoman pada surat Menteri PANRB Nomor B/204/M.SM.04.00/2019, Surat Menteri PANRB Nomor B/324/M.SM.04.00/2020, dan Surat Menteri PANRB Nomor B/1328/M.SM.04.00/2020.
- (7) Penetapan kelas jabatan fungsional yang diduduki disetarakan dengan jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional.
- (8) Penentuan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berlaku sampai dengan diterbitkannya Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan dari Kementerian PANRB, yang selanjutnya akan dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.
- (9) Dengan diterbitkannya Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan dari Kementerian PANRB dan dilakukan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka dampak terhadap perubahan besaran pagu per kelas jabatan berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya Perubahan Peraturan Bupati ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 33 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 MARET 2022

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayarkan gaji yang adil dan layak kepada Pegawai ASN serta menjamin kesejahteraan Pegawai ASN. Komponen pendapatan yang diterima Pegawai ASN hanya terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja, sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan indeks harga yang berlaku di masing-masing daerah.

Segala peraturan dibawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dampak dari pemberlakuan sistem penggajian dan tunjangan yang semula berbasis pangkat, golongan dan masa kerja menuju merit sistem berbasis pada kelas jabatan dan nilai jabatan yang diperoleh dari hasil evaluasi jabatan.

Evaluasi jabatan merupakan bagian dari proses Sumberdaya Manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan. Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan gaji dan tunjangan kinerja yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan tersebut.

Secara kualitas sumber daya aparatur, diukur dari kompetensi pegawai dalam melaksanakan sebuah tugas pekerjaan Pemerintah Daerah. Kompetensi pegawai adalah kemampuan pegawai yang meliputi kemampuan pengetahuan atau wawasan, kemampuan keterampilan, dan perilaku yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan. Kuantitas dan kualitas aparatur yang tepat dan memadai akan mendorong pada kinerja pegawai lebih produktif dan terarah mencapai tujuan dan sasaran membangun Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional.

Dengan demikian diperlukan sebuah manajemen sumberdaya aparatur yang dapat mengelola kuantitas dan kualitas pegawai untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah. Manajemen sumberdaya manusia yang komprehensif dengan sistem pengukuran kinerja pegawai yang terukur dan memberikan *feedback* kepada manajemen sumberdaya manusia secara umum.

Manajemen kinerja pegawai menempatkan pegawai sebagai aset Pemerintah Daerah yang perlu dikelola dengan tepat untuk pencapaian kinerja organisasi. Manajemen yang merupakan subsistem dalam manajemen sumberdaya manusia dibangun sebagai landasan dalam pengembangan pegawai maupun pengembangan organisasi secara utuh, serta menjadi dasar dalam pemberian kompensasi berupa tambahan penghasilan bagi pegawai.

B. NILAI DAN KELAS JABATAN

Evaluasi jabatan merupakan suatu proses manajemen sumberdaya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria - kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. Setiap Pemerintah Daerah melakukan evaluasi jabatan untuk menyusun peringkat (kelas) jabatan dilingkungan masing - masing. Pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan). Nilai jabatan dan kelas jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelas Jabatan	Batas Nilai	Nilai Rata - Rata Jabatan	Kenaikan Nilai dari Nilai Rata-Rata Jabatan dibawahnya
1	15	3155-4050	3378	425
2	14	2755-3150	2953	400
3	13	2355-2750	2553	325
4	12	2105-2350	2228	250
5	11	1855-2100	1978	250
6	10	1605-1850	1728	250
7	9	1355-1600	1478	250
8	8	1105-1350	1228	250
9	7	855-1100	978	225
10	6	655-850	753	200
11	5	455-650	553	140
12	4	375-450	413	75
13	3	305-370	338	65
14	2	245-300	273	58
15	1	190-240	215	-

C. INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi: bobot 1;
- 2) Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi: bobot 0,85;
- 3) Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,7;
- 4) Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
- 5) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Tanah Laut adalah 0,70 (nol koma tujuh puluh) masuk dalam kelompok kapasitas fiskal sedang.

D. INDEKS KEMAHALAN KONTRUKSI (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Oleh karena itu, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tanah Laut berdasarkan buku Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/ Kota 2020 keluaran BPS RI, dengan nilai IKK sebesar 94,34. Perbandingan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Tanah Laut (94,34) dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Jakarta Pusat (108,34) = 0,87077718.

E. INDEKS PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH (IPPD)

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

Komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas:

- 1) Opini Laporan Keuangan;
- 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
- 4) Indeks Inovasi Daerah;
- 5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
- 7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Komponen variabel hasil terdiri atas:

- a. Indeks pembangunan manusia; dan
- b. Indeks gini ratio.

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

No	Variabel	Kategori	Nilai	SIPPD
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	300
2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi	750	187,5
3	Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Tinggi	800	80
4	Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah 1-300	400	12
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A)	1000	180
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 4,01 – 6 %	600	12
7	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 – 60 %	400	8
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM 60 sd 69	500	30
9	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio 0,20 sd 0,35	1000	40
	Total			849.5

F. BASIC TPP

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah besaran Basic TPP ASN diperoleh menggunakan rumus:

"(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiscal daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)"

$$IKFD \times IKK \times IPPD = 0,70 \times 0,87 \times 1,00 = 0,6095$$

Sehingga Basic TPP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar :

$$\text{Besaran Tunjangan BPK} \times 0,6095$$

G. BESARAN TPP BPK

KELAS	RP. BPK	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP
16	36,870,000	0,6095	22.473.888
15	29,286,000		17.851.106
14	22,295,000		13.589.784
13	20,010,000		12.196.976
12	16,000,000		9.752.704
11	12,370,000		7.540.060
10	10,760,000		6.558.694
9	9,360,000		5.705.332
8	7,523,000		4.585.600
7	6,633,000		4.043.106
6	5,764,000		3.513.412
5	4,807,000		2.930.078
4	2,849,000		1.736.591
3	2,354,000		1.434.867
2	1,947,000		1.186.782
1	1,540,000		938.698

H. KLASIFIKASI SKPD

Klasifikasi SKPD digunakan untuk keseimbangan perbandingan TPP ASN dengan memperhatikan indeks kelas jabatan dan nilai jabatan Kepala SKPD.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka untuk menentukan besaran TPP ASN dibagi dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu :

1. Klasifikasi I terdiri dari Sekretariat Daerah.
2. Klasifikasi II terdiri dari SKPD :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Badan Pendapatan Daerah.
3. Klasifikasi III terdiri dari SKPD :
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Pariwisata;
 - h. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - j. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - l. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - q. Dinas Sosial;
 - r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

4. Klasifikasi IV terdiri dari SKPD :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Kecamatan; dan
- c. Kelurahan.

I. PENYUSUNAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD, yang masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mempunyai satu atau lebih target kinerja. Target kinerja dituangkan dalam bentuk :

1. Target Kuantitas *Output*

Target Kuantitas *Output* adalah target dari jumlah hasil kerja yang diperoleh dari program/kegiatan/sub kegiatan secara langsung baik berupa barang/dokumen atau frekuensi aktivitas kerja.

Penetapan target kuantitas *output* disesuaikan dengan kontribusi terhadap Indikator Kinerja Perangkat Daerah untuk target kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk pejabat struktural lain sampai dengan Fungsional umum/pelaksana secara hierarki mengacu pada target kinerja Kepala Perangkat Daerah. Satuan yang digunakan dalam target kuantitas *output* sangat bergantung pada hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan dan dapat diukur, misalnya dokumen, laporan, naskah, lembar kerja, dan lain-lain.

2. Target Kualitas *Output*

Target Kualitas *Output* adalah target mutu dari hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan dari program/kegiatan/sub kegiatan. Mutu hasil kerja dapat diukur dari kualitas barang/dokumen, tingkat ketepatan waktu/sasaran, atau kualitas proses pekerjaan.

Satuan yang digunakan dalam target kualitas *output* adalah persen (%), besaran persentase target kualitas *output* tergantung pada kualitas hasil kerja atau aktivitas kerja pada target kuantitas *output* yang diharapkan.

3. Target Waktu

Target Waktu adalah target dari waktu penyelesaian sebuah pekerjaan dianggap selesai secara tuntas. Satuan yang digunakan dalam target waktu adalah hari, minggu, bulan dan tahun, misalnya:

- 1 (satu) hari untuk hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan kurang dari 1 (satu) hari;

- 1 (satu) minggu untuk hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan kurang dari 1 (satu) minggu;
- 1 (satu) bulan untuk hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan kurang dari 1 (satu) bulan; dan
- 12 (dua belas) bulan untuk pekerjaan yang rutin dilakukan setiap satu bulan satu kali selama 1 (satu) tahun.

4. Target Biaya

Target Biaya adalah target dari anggaran atau penerimaan yang menjadi beban atau target penerimaan dalam APBD. Satuan yang digunakan dalam target biaya adalah rupiah (Rp) sesuai dengan jumlah anggaran belanja atau target penerimaan yang ada dalam APBD. Target biaya diperuntukkan bagi pejabat struktural serendah-rendahnya eselon IV/Pejabat Pengawas.

5. Pegawai yang menduduki jabatan atau penugasan khusus atau kondisi tertentu, penyusunan target kinerja diatur sebagai berikut:

- a. Pegawai yang diperbantukan pada Instansi lain.

Target kinerja disusun berdasarkan penempatan dalam jabatan pada instansi sesuai ketentuan umum dan persyaratan umum.

- b. Pegawai yang Memiliki Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun Target kinerja disusun berdasarkan jabatan sesuai ketentuan umum untuk kurun waktu sisa masa kerja aktif.

- c. Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu yang Telah Mencapai Pangkat Maksimal

Target kinerja disusun berdasarkan jabatan sesuai ketentuan umum dengan tidak menyusun dan memperhatikan target angka kredit, serta menyesuaikan dengan tugas pokok jabatan fungsional tertentu tersebut.

- d. Pegawai Pindahan dari Instansi Pemerintah Daerah lain

Target kinerja disusun berdasarkan jabatan sesuai ketentuan umum terhitung mulai tanggal ditempatkan.

6. Penyusunan target kinerja disusun sesuai dengan format Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdiri dari lima bagian utama, yaitu:

- a. Bagian data pegawai yang dinilai

Pada bagian data pegawai diuraikan nama, nomor induk pegawai (NIP), pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja pegawai. Nama, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja diisi sesuai surat keputusan pengangkatan atau penempatan dalam jabatan pegawai terakhir.

Pengisian jabatan untuk pelaksana/staf/jabatan fungsional umum tidak hanya dicantumkan pelaksana, namun diikuti dengan jabatan spesifik

lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, atau sesuai dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana/Penempatan Pegawai Dalam Jabatan.

Pengisian unit kerja sesuai dengan unit kerja pada jabatan Atasan Langsung pegawai.

b. Bagian Data Atasan Langsung pegawai yang dinilai

Pada bagian data atasan langsung pegawai yang dinilai, diuraikan nama, nomor induk pegawai (NIP), pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja dari atasan langsung pegawai.

Nama, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja diisi sesuai surat keputusan pengangkatan atau penempatan dalam jabatan atasan langsung pegawai terakhir.

Pengisian unit kerja sesuai dengan unit kerja pada jabatan atasan dari atasan langsung pegawai.

c. Bagian Kegiatan Tugas Jabatan

Pada bagian kegiatan tugas jabatan, diisi sesuai dengan kegiatan yang menjadi tugas pokok jabatan pegawai yang ditulis pada bagian data pegawai yang dinilai, meliputi:

1. Jabatan Struktural

Pada pegawai yang menduduki jabatan struktural, maka bagian Kegiatan Tugas Jabatan dapat diisi tugas pokok yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah atau dengan nama kegiatan yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kepala Perangkat Daerah diisi dengan program, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati dan DPA Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- b) Staf ahli Bupati diisi dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati.
- c) Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator dan Eselon IV/Pejabat Pengawas/Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah diisi dengan program, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati dan DPA masing-masing.

- d) Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas pada Unit Pelayanan Teknis diisi dengan program, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati dan DPA masing-masing.
- e) Pelaksana pada Unit Pelayanan Teknis diisi dengan program, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati dan DPA masing-masing.

Pengisian kegiatan tugas jabatan bagi:

- a) Pejabat struktural yang tidak mempunyai program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA, maka diisi dengan uraian tugas yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya apabila berturut-turut dalam dua tahun pejabat struktural tidak mempunyai program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan uraian tugas, maka akan dilakukan kajian penataan kelembagaan untuk jabatan tersebut.
- b) Pejabat struktural yang melaksanakan secara penuh program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA karena sesuai dengan tugas jabatannya, tetapi tidak menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka diisi dengan program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA.
- c) Pejabat struktural yang mempunyai program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA tetapi tidak sesuai dengan tugas jabatannya, maka diisi hanya program/kegiatan/subkegiatan yang menjadi tanggungjawabnya saja yang sesuai dengan tugas jabatan. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan/ atau menjadi PPTK/KPA/PA yang tidak sesuai dengan tugas jabatannya maka tidak perlu diisi dalam Kegiatan Tugas Jabatan namun selanjutnya dapat menjadi tugas tambahan.
- d) Pejabat struktural eselon IV/Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah yang kegiatannya bersifat tunggal atau tidak memiliki subkegiatan, maka diisi dengan kegiatan sama dengan pejabat eselon III/Pejabat Administrator sesuai dengan tugas jabatan eselon IV/Pejabat Pengawas.
- e) Pejabat struktural yang menjadi Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt), tidak perlu

mencantumkan program/ kegiatan/ subkegiatan jabatan Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) tersebut dalam kegiatan tugas jabatan, namun cukup diisi hanya program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya saja yang sesuai dengan tugas jabatan. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan/atau menjadi PPTK/KPA/PA yang menjadi tanggung jawab Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) selanjutnya dapat menjadi tugas tambahan.

- f) Pejabat struktural yang diangkat dari pejabat fungsional tertentu dan tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional, maka kegiatan tugas jabatan hanya diisi dengan program/kegiatan/sub kegiatan jabatan struktural, sedangkan tugas jabatan fungsional dapat menjadi tugas tambahan.

2. Jabatan Fungsional Umum Yang Melaksanakan Tugas Tertentu

Pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum yang melaksanakan tugas tertentu, maka bagian Kegiatan Tugas Jabatan diisi dengan uraian tugas sesuai dengan jabatan pegawai yang diatur dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

d. Bagian target kerja

Pada bagian target kerja, diisi target dari hasil kerja atau aktivitas kerja dari setiap kegiatan atau uraian jabatan yang ada pada bagian Kegiatan Tugas Jabatan masing-masing satu atau lebih target kerja.

Target kerja terdiri dari:

1) Target Angka Kredit

Bagian target angka kredit diisi dengan target angka kredit untuk setiap kegiatan unsur utama atau unsur penunjang bagi pejabat fungsional tertentu yang apabila diakumulasikan menjadi target angka kredit untuk satu tahun anggaran.

2) Target Kuantitas *Output*

Bagian target kuantitas *output* diisi dengan jumlah hasil kerja atau aktivitas kerja dari setiap uraian pada bagian Kegiatan Tugas Jabatan bagi seluruh jenis jabatan. Khusus bagi jabatan fungsional tertentu, kuantitas *output* berbanding lurus dengan target angka kredit pada bagian target angka kredit sebelumnya.

3) Target Kualitas *Output*

Bagian target kualitas *output* diisi dengan presentase hasil atau pelaksanaan *output* kerja pada bagian target kuantitas *output* bagi seluruh jenis jabatan.

4) Target Waktu

Bagian target waktu diisi dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja atau pelaksanaan aktivitas kegiatan bagi seluruh jenis jabatan.

5) Target Biaya

Bagian target biaya diisi dengan biaya atau pendapatan yang dianggarkan dalam DPA atau target pendapatan dalam APBD. Target biaya hanya diisi bagi Pengguna Anggaran.

e. Bagian Penetapan Sasaran Kerja Pegawai

Pada bagian penetapan SKP diisi dengan tempat dan tanggal penetapan SKP, dan tandatangan disertai nama dan NIP pegawai yang dinilai dan pejabat penilai yaitu atasan langsung pegawai.

J. PENJABARAN TARGET KINERJA

Target kinerja yang telah disusun dalam satu tahun, kemudian diuraikan dalam target kinerja bulanan berdasarkan penjabaran pencapaian target kuantitas *output* yang akan dicapai setiap bulan. Lebih lanjut penjabaran pencapaian target kinerja bulanan disusun sebagai berikut:

1. Penjabaran target kinerja disusun dengan menggunakan format Sasaran Kerja Pegawai, memperhatikan target kuantitas *output* SKP tahunan.
2. Apabila target kuantitas *output* dalam bentuk hasil kerja berupa dokumen, naskah atau barang maka target kinerja bulannya disusun dengan membagi hasil kerja tersebut dengan target waktu yang direncanakan.

Contoh :

Seorang pegawai yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pengembangan Karir, dalam SKP Tahunannya, mencantumkan:

SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2021 PEGAWAI ASN

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI
1	Nama	1	Nama
2	NIP	2	NIP
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/Gol.Ruang
4	Jabatan	4	Jabatan
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja

NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mengendalikan kegiatan rapat koordinasi		51 Kali	100	12 Bulan	-
2	Mengendalikan kegiatan Bimtek		48 Keg	100	6 Bulan	-
3	Mengendalikan kegiatan Evaluasi Karir Pegawai ASN		48 Keg	100	7 Bulan	-

Pejabat Penilai,

Tanah Laut,
Pegawai ASN Yang Dinilai.....
NIP.
NIP.

Maka penjabaran target kinerja bulanannya, disusun dalam 1 (satu) bulan yaitu Bulan Januari 2021, sebagai berikut :

FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI ASN

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI			
1	Nama	1	Nama			
2	NIP	2	NIP			
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/Gol.Ruang			
4	Jabatan	4	Jabatan			
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mengendalikan kegiatan rapat koordinasi					
1.a	Melaksanakan rapat koordinasi Awal		5 Kali	100	1 Bulan	
1.b	Melaksanakan rapat pembahasan materi Bimtek		4 Kali	100	1 Bulan	
1.c	Melaksanakan rapat Asistensi		1 Kali	100	1 Bulan	
2	Mengendalikan kegiatan Pembinaan Karir					-
2.a	Melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Kementerian		1 Kali	100	1 Bulan	
2.b	Melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Provinsi		1 Kali	100	1 Bulan	

Pejabat Penilai,

Tanah Laut,
Pegawai ASN Yang Dinilai.....
NIP.
NIP.

3. Apabila target kuantitas *output* dalam bentuk aktivitas kerja bulanan disusun dengan menguraikan sub-sub aktifitas kerja tersebut dengan target waktu yang direncanakan.

Contoh :

Seorang pegawai yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pengembangan Karir, dalam SKP Tahunannya, mencantumkan:

SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2021
PEGAWAI ASN

NO		I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI	
1	Nama			1	Nama		
2	NIP			2	NIP		
3	Pangkat/Gol.Ruang			3	Pangkat/Gol.Ruang		
4	Jabatan			4	Jabatan		
5	Unit Kerja			5	Unit Kerja		
NO		III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK		TARGET	
						KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU
						WAKTU	BIAYA (Rp)
1	Mengendalikan kegiatan rapat koordinasi			51	Kali	100	12 Bulan
2	Mengendalikan kegiatan Pembinaan Karir Pegawai ASN			48	PD	100	6 Bulan
3	Mengendalikan kegiatan Evaluasi Pengembangan Karir			48	PD	100	7 Bulan

Pejabat Penilai,

NIP.

Tanah Laut,

Pegawai ASN Yang Dinilai

NIP.

maka penjabaran target kinerja bulannya, disusun sesuai bulan yang direncanakan berikut :

FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI ASN

NO		I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI	
1	Nama			1	Nama		
2	NIP			2	NIP		
3	Pangkat/Gol.Ruang			3	Pangkat/Gol.Ruang		
4	Jabatan			4	Jabatan		
5	Unit Kerja			5	Unit Kerja		
NO		III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK		TARGET	
						KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU
						WAKTU	BIAYA (Rp)
1	Mengendalikan kegiatan rapat koordinasi			4	KALI	100%	1 BULAN
2	Mengendalikan kegiatan Pembinaan Karir Pegawai ASN			10	%	100%	1 BULAN

Pejabat Penilai,

NIP.

Tanah Laut,

Pegawai ASN Yang Dinilai

NIP.

4. Penjabaran target kinerja tahunan disusun sebanyak 1 (satu) SKP, yaitu pada Bulan Januari.
5. Penjabaran target kinerja bulanan disusun sebanyak 12 (dua belas) SKP, yaitu SKP Bulan Januari sampai dengan SKP Bulan Desember.
6. SKP setiap Bulan berisi seluruh kegiatan tugas jabatan, baik yang tercantum di Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maupun dalam DPA.
7. Satuan waktu pada target waktu SKP bulanan adalah hari, minggu atau bulan.
8. Target kinerja pada SKP setiap bulan pada kegiatan Tugas Jabatan Pejabat fungsional tertentu sesuai dengan penyusunan target kinerja SKP Tahunan.

K. PENETAPAN TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan capaian hasil kerja atau aktivitas kerja dari kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pegawai, mengacu pada indikator kinerja atasan langsung secara hierarki dalam kerangka pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Untuk itu penetapan target kinerja pegawai disepakati antara pegawai dengan atasan langsung.

Atasan Langsung adalah pejabat struktural paling rendah eselon IV atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menjadi Pejabat Penilai yang mempunyai hak untuk menyepakati target kinerja dan melakukan penilaian atas pencapaian target kinerja yang menjadi bawahannya.

1. Untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum/pelaksana/staf maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon IV/Pejabat Pengawas.
2. Untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon III/Pejabat Administrator yang membidangnya.
3. Untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada UPT maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon IV/Pejabat Pengawas/Kepala UPT .
4. Untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV.a pada UPT, maka pejabat penilai adalah Kepala SKPD.

5. Untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV.b/Pejabat Pengawas pada UPT, maka pejabat penilai adalah Kepala UPT.
6. Untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV.a/Pejabat Pengawas, maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon III.
7. Untuk pegawai yang menduduki jabatan eselon III, maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon II.b pada Organisasi Perangkat Daerah.
8. Untuk pegawai yang menduduki jabatan sebagai Kepala SKPD atasan penilai pada aplikasi e-kita adalah Asisten yang membidangi.
9. Untuk Asisten dan Staf Ahli maka atasan penilai pada aplikasi e-kita adalah Sekretaris Daerah.
10. Apabila dalam kondisi tertentu, jabatan Atasan Langsung belum terisi oleh pejabat definitif, maka Pejabat Penilai adalah atasan dari Atasan Langsung pada Perangkat Daerah tersebut secara hierarki atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atasan dari Atasan Langsung.

Atasan Langsung bertanggungjawab sepenuhnya bersama pegawai yang bersangkutan terhadap penentuan target kinerja dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Target kinerja disusun oleh pegawai mengikuti kegiatan sesuai dengan tugas pokok/fungsi jabatan dan target kinerja Atasan Langsung pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Atasan Langsung menyepakati target kinerja pegawai sesuai dengan pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Target kinerja pegawai yang ditetapkan dibuat 3 (tiga) rangkap, rangkap pertama untuk dijadikan kendali oleh pegawai yang bersangkutan, rangkap kedua dijadikan kendali oleh Atasan Langsung, rangkap ketiga dijadikan kendali oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

L. PERUBAHAN TARGET KINERJA

1. Perubahan Target Kinerja Tahunan

Target kinerja yang ditetapkan pada prinsipnya berlaku untuk satu tahun, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Target kinerja dapat ditambah, dikurang atau dibuat kembali sesuai dengan

keadaan tertentu. Perubahan target kinerja dilakukan dalam keadaan tertentu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan Jabatan

Pegawai yang ditempatkan pada jabatan baru akibat rotasi, promosi, maupun demosi jabatan, maka target kinerja diubah sesuai dengan jabatan baru dengan masa waktu target sisa dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan target kinerja pejabat sebelumnya. Target kinerja jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di akhir tahun.

b. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Tugas pokok dan fungsi jabatan yang mengalami perubahan akibat penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan baru dengan masa waktu target kinerja sisa dalam 1 (satu) tahun. Target kinerja tugas pokok fungsi jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di akhir tahun.

c. Perubahan anggaran

Program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan anggaran akibat pergeseran atau perubahan APBD atau perubahan target pendapatan pada Pajak Daerah/Retribusi Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan dampak dari perubahan anggaran atau perubahan target pendapatan.

d. Pegawai melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, cuti hamil, cuti besar, dan cuti sakit.

Berkurangnya masa kerja aktif pegawai akibat pegawai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, cuti, hamil, cuti besar atau cuti sakit, maka target kinerja diubah menyesuaikan dengan sisa masa kerja 1 (satu) tahun dikurangi masa cuti yang dilaksanakan.

e. *Force Majeur*

Dalam hal terjadi bencana alam, perubahan sistem ketatanegaraan atau kondisi *Force majeure* lain yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh *force majeure* baik kuantitas *output*, kualitas *output*, waktu maupun biaya yang ditargetkan sebelumnya.

2. Perubahan Target Kinerja Bulanan

Target kinerja yang ditetapkan pada prinsipnya berlaku untuk satu bulan. Target kinerja dapat ditambah, dikurang atau dibuat kembali sesuai dengan keadaan tertentu. Perubahan target kinerja dilakukan dalam keadaan tertentu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan Jabatan

Pegawai yang ditempatkan pada jabatan baru akibat rotasi, promosi, maupun demosi jabatan, maka target kinerja diubah sesuai dengan jabatan baru dengan masa waktu target sisa dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan target kinerja pejabat sebelumnya. Target kinerja jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di akhir bulan.

b. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Tugas pokok dan fungsi jabatan yang mengalami perubahan akibat penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan baru dengan masa waktu target kinerja sisa dalam 1 (satu) bulan. Target kinerja tugas pokok fungsi jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di akhir bulan.

c. Perubahan anggaran

Program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan anggaran akibat pergeseran atau perubahan APBD atau perubahan target pendapatan pada Pajak Daerah/Retribusi Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan dampak dari perubahan anggaran atau perubahan target pendapatan.

d. Pegawai melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, cuti hamil, cuti besar, dan cuti sakit.

Berkurangnya masa kerja aktif pegawai akibat pegawai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, cuti, hamil, cuti besar atau cuti sakit, maka target kinerja diubah menyesuaikan dengan sisa masa kerja 1 (satu) bulan dikurangi masa cuti yang dilaksanakan.

e. *Force Majeur*

Dalam hal terjadi bencana alam, perubahan sistem ketatanegaraan atau kondisi *Force majeure* lain yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan

Pemerintah Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh *force majeure* baik kuantitas *output*, kualitas *output*, waktu maupun biaya yang ditargetkan sebelumnya.

M. PERILAKU KERJA

Evaluasi kinerja untuk Pegawai Pemerintah Daerah juga diukur dari kemampuan kepribadian berupa perilaku kerja yang dilakukan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai ASN. Pengukuran perilaku kerja pegawai meliputi :

1. Orientasi Pelayanan

Orientasi pelayanan merupakan kemampuan Pegawai ASN untuk mengetahui, memahami, dan memenuhi kebutuhan yang dilayani dalam setiap aktivitas kegiatan.

Penilaian orientasi pelayanan diukur dengan :

- a. dapat memenuhi kebutuhan Penerima Layanan;
- b. dapat menindaklanjuti permintaan, pertanyaan dan keluhan Penerima Layanan;
- c. dapat memberikan informasi terkini tentang segala sesuatu yang relevan kepada Penerima Layanan;
- d. dapat memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan; dan
- e. dapat mencari alternatif terbaik untuk kepuasan Penerima Layanan.

2. Integritas

Integritas merupakan perilaku Pegawai ASN yang mampu bertindak konsisten sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi. Penilaian integritas diukur dengan :

- a. tidak bersikap kompromi jika berhubungan dengan kode etik profesi;
- b. mematuhi peraturan dan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh jabatannya;
- c. mampu menepati janji dan konsisten terhadap pekerjaan yang dilakukan;
- d. berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan; dan
- e. mampu menjaga kerahasiaan jabatan.

3. Komitmen

Komitmen merupakan perilaku Pegawai ASN yang mampu dan memiliki motivasi dalam menyelaraskan perilaku diri untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan

dinas dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan.

Penilaian komitmen diukur dengan :

- a. dapat memahami pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya;
- b. dapat ikut serta dalam agenda daerah dan atau agenda nasional (hari besar nasional, perayaan PHBN, HUT Kabupaten, apel kesadaran nasional, dan lain-lain);
- c. dapat mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai; dan
- d. dapat menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

4. Disiplin

Disiplin merupakan perilaku Pegawai ASN yang sanggup melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Penilaian disiplin diukur dengan :

- a. kehadiran apel;
- b. kehadiran pada jam kerja; dan
- c. kerapian dan kelengkapan atribut pakaian dinas.

5. Kerja Sama

Kerjasama merupakan perilaku Pegawai ASN yang mampu dan memiliki motivasi untuk bekerjasama dengan rekan sekerja, atasan, dan bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya. Penilaian kerjasama diukur dengan :

- a. berperan aktif sebagai anggota Organisasi dalam melakukan tugas/bagiannya untuk mendukung keputusan Organisasi;
- b. dapat membantu rekan kerja/anggota tim yang membutuhkan;
- c. dapat menjaga hubungan kerja yang baik; dan
- d. dapat mendukung atau memfasilitasi pemecahan masalah.

6. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan perilaku Pegawai ASN yang mampu dan mau memotivasi serta mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.

Penilaian kepemimpinan diukur dengan :

- a. dapat memimpin rapat dengan baik (menyampaikan tujuan dan agenda, mengendalikan waktu, memberi tugas, dan lain-lain);
- b. dapat mengarahkan bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan tim untuk bekerja dengan baik;
- d. dapat mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi; dan
- e. dapat memberikan contoh dengan melakukan perilaku yang diinginkan.

N. PENILAIAN KINERJA

1. Penilaian Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target kerja setiap pegawai dinilai setiap tahun sebagai PPK dan setiap bulan sebagai dasar pemberian TPP ASN yang merupakan bahan evaluasi kinerja pegawai. Evaluasi kinerja selanjutnya menjadi acuan dalam pemberian *reward and punishment*, pelaksanaan sistem promosi dan sistem pendidikan, serta pelatihan pegawai.

Penilaian diukur dari pencapaian unsur-unsur target kinerja sebagai berikut:

- a. Penilaian Target Kinerja Kuantitas *Output*.
- b. Penilaian Target Kinerja Kualitas *Output*.
- c. Penilaian Target Kinerja Waktu.
- d. Penilaian Target Kinerja Biaya.

Nilai capaian target kinerja dinyatakan dalam angka dan sebutan, sebagai berikut :

- a. 91 – ke atas : Sangat Baik;
- b. 76 – 90 : Baik;
- c. 61 – 75 : Cukup;
- d. 51 – 60 : Kurang; dan
- e. 50 – ke bawah : Buruk.

Bobot dari penilaian pencapaian target kinerja secara keseluruhan adalah 70%(tujuh puluh persen) dari penilaian kinerja pegawai.

2. Penilaian Perilaku Kerja

Penilaian perilaku kinerja pegawai diukur dari masing-masing aspek perilaku kinerja dalam setiap bulan dan diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun, dengan penilaian sebagai berikut :

1) Orientasi pelayanan

Penilaian orientasi pelayanan diukur dengan :

- a. dapat memenuhi kebutuhan Penerima Layanan;
- b. dapat menindaklanjuti permintaan, pertanyaan dan keluhan Penerima Layanan;
- c. dapat memberikan informasi terkini tentang segala sesuatu yang relevan kepada Penerima Layanan;
- d. dapat memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan; dan
- e. dapat mencari alternatif terbaik untuk kepuasan Penerima Layanan.

2) Integritas

Penilaian integritas diukur dengan :

- tidak bersikap kompromi jika berhubungan dengan kode etik profesi;
- mematuhi peraturan dan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh jabatannya;
- mampu menepati janji dan konsisten terhadap pekerjaan yang dilakukan;
- berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan; dan
- mampu menjaga kerahasiaan jabatan.

3) Komitmen

Penilaian komitmen diukur dengan :

- dapat memahami pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya;
- dapat ikut serta dalam agenda daerah dan atau agenda nasional (hari besar nasional, perayaan PHBN, HUT Kabupaten, apel kesadaran nasional, dan lain-lain);
- dapat mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai; dan
- dapat menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

4) Disiplin

Penilaian disiplin diukur dengan :

- kehadiran apel;

kehadiran pada jam kerja; dan
kerapihan dan kelengkapan atribut pakaian dinas.

5) Kerja Sama

Penilaian kerjasama diukur dengan :

- berperan aktif sebagai anggota Organisasi dalam melakukan tugas/bagiannya untuk mendukung keputusan Organisasi;
- b. dapat membantu rekan kerja/anggota tim yang membutuhkan;
- c. dapat menjaga hubungan kerja yang baik; dan
- d. dapat mendukung atau memfasilitasi pemecahan masalah.

6) Kepemimpinan

Penilaian kepemimpinan diukur dengan :

- dapat memimpin rapat dengan baik (menyampaikan tujuan dan agenda, mengendalikan waktu, memberi tugas, dan lain-lain);
- dapat mengarahkan bawahan menyelesaikan pekerjaan;
- dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan tim untuk bekerja dengan baik;
- dapat mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi; dan
- dapat memberikan contoh dengan melakukan perilaku yang diinginkan.

3. Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja adalah penilaian pencapaian target kinerja, tugas tambahan, kreativitas dan perilaku kerja pegawai. Penilaian dilakukan sesuai dengan unsur-unsur penilaian kinerja dengan bobot untuk pencapaian target kerja 70% (tujuh puluh persen) dan perilaku kerja 30% (tiga puluh persen). Penilaian tugas tambahan dan kreativitas merupakan bagian dari penilaian pencapaian target kerja yang diukur setelah penilaian dan pembobotan dari target kinerja kemudian ditambahkan nilai tugas tambahan dan kreativitas sesuai dengan penilaian tersendiri.

Nilai capaian prestasi kerja dinyatakan dalam angka dan sebutan, sebagai berikut :

- a. 91 – ke atas : Sangat Baik;
- b. 76 – 90 : Baik;
- c. 61 – 75 : Cukup;
- d. 51 – 60 : Kurang; dan
- e. 50 – ke bawah : Buruk.

4. Waktu Penilaian

Penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan setiap bulan, dengan tahapan penilaian sebagai berikut :

- 1) Pegawai menyampaikan realisasi prestasi kerja atas pencapaian target kinerja Pegawai ASN pada sasaran kerja pegawai, kreativitas, dan perilaku kerja setiap akhir bulan berjalan.
- 2) Atasan Langsung melakukan penilaian terhadap usulan realisasi prestasi kerja pegawai setiap akhir bulan berjalan.
- 3) Atasan Langsung menerima atau menolak laporan realisasi prestasi kerja yang disampaikan pegawai, dengan memperhatikan kebenaran laporan dan informasi lain yang relevan.

5. Hasil Penilaian Kinerja

Hasil penilaian prestasi kerja pegawai, merupakan akumulasi penilaian Sasaran Kerja Pegawai, tugas tambahan, kreativitas, dan perilaku kerja dari setiap pegawai setiap bulan oleh atasan langsung, sesuai dengan jabatan dan target kerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Hasil penilaian prestasi kerja pegawai digunakan untuk menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada pegawai setiap bulannya. Pencapaian prestasi kerja pegawai dikalikan langsung dengan nilai jabatan dan/atau instrumen lain kemudian dikalikan dengan indeks uang sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

O. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (TPP ASN)

1. Pemberian TPP ASN

Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis kinerja adalah Tambahan yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan mendasarkan perhitungan penilaian sasaran kerja pegawai dan Tingkat Kedisiplinan Pegawai.

2. Pemberian TPP ASN Mengikuti Ketentuan Sebagai berikut:

a) PERHITUNGAN SKP

RENTANG PENILAIAN	NILAI	PAGU TPP	PERHITUNGAN TPP (SKP)
85 – 100	100 %	70%	100 % x 70%

76 – 84	90 %	70%	90 % x 70%
60 – 75	80 %	70%	80% x 70%
51 – 59	70 %	70%	70% x 70%
≤ 50	60 %	70%	60% x 70%

b) PERHITUNGAN TPP INDEK KEDISIPLINAN (ID)

FAKTOR	NILAI ID	PAGU TPP	PERHITUNGAN TPP (ID)
1	2	3	4
Indek Kedisiplinan (ID)	Persentase ID Finger Print Pegawai ASN	30%	K2 x k3

3. Faktor Pengurang

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tambahan penghasilan Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1(satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tambahan penghasilan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PROSENTASE PENGURANGAN (30% dari Indeks Kedisiplinan)
TL 1	1 menit s.d 30 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d 60 menit	1%
TL 3	61 menit s.d 90 menit	1,25 %
TL 4	≥ 90 menit	1,5 %

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tambahan penghasilan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PROSENTASE PENGURANGAN (30% dari Indeks Kedisiplinan)
PSW 1	1 menit s.d 30 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d 60 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d 90 menit	1,25 %

PSW 4	≥ 90 menit	1,5 %
-------	------------	-------

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Perhitungan

$$(A + B) - C = \text{TPP ASN}$$

$(\text{TPP ASN (SKP)} + \text{TPP ASN (ID)}) - \text{faktor pengurang} = \text{Jumlah TPP yang diterima}$

TPP ASN yang akan diterima oleh pegawai adalah hasil perhitungan TPP SKP ditambah dengan hasil perhitungan TPP ASN ID pada bulan berjalan dikurangi besaran potongan yang dikenakan.

Contoh :

Pegawai atas nama A dengan jabatan Kepala Bidang dengan Pagu TPP ASN sebesar Rp7.000.0000,00 memperoleh nilai PPK sebesar 85 dan dengan ID pernah 1 (satu) kali datang terlambat lebih dari 90 menit dan 1 (satu) kali pulang lebih awal lebih dari 90 menit, maka Perhitungan TPP ASN nya adalah :

1. TPP ASN SKP

$$100\% \times 70\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}4.900.000,00$$

2. TPP ASN ID

$$97\% \times 30\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}2.037.000,00$$

3. PENGURANG

$$(1 \times 1.5\%) = 1,5\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}105.000,00$$

$$(1 \times 1.5\%) = 1,5\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}105.000,00$$

$$= \text{Rp}210.000,00$$

Jumlah TPP ASN yang diterima adalah :

$$\text{Rp}4.900.000,00 + \text{Rp}2.037.000,00 - \text{Rp}221.000,00$$

$$(\text{Rp}6.916.000,00 - \text{Rp}221.000,00) = \text{Rp}6.716.000,00$$

P. PENUTUP

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN diberikan untuk memacu setiap Pegawai ASN dalam merealisasikan target kinerja. Sementara itu peningkatan daya guna dan hasil guna penilaian prestasi kerja perlu dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi, dalam arti Pegawai ASN yang dinilai terlibat langsung secara aktif dalam proses penetapan sasaran kerja yang akan dicapai dan proses penilaian.

Hasil rekomendasi penilaian prestasi kerja digunakan untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier Pegawai ASN yang bersangkutan, serta pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN merupakan acuan bagi Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja dan manajemen sumber daya manusia untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Q. FORMAT FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUNAN

NO		I. PEJABAT PENILAI	NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI			
1		Nama	1		Nama			
2		NIP	2		NIP			
3		Pangkat/Gol.Ruang	3		Pangkat/Gol.Ruang			
4		Jabatan	4		Jabatan			
5		Unit Kerja	5		Unit Kerja			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET					
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA		
1								
2								
3								

Pejabat Penilai,

Tanah Laut,

Pegawai ASN Yang Dinilai

.....
NIP.

.....
NIP.

R. FORMAT FORMULIR SASARAN KERJA BULANAN PEGAWAI ASN

NO		I. PEJABAT PENILAI	NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI			
1		Nama	1		Nama			
2		NIP	2		NIP			
3		Pangkat/Gol.Ruang	3		Pangkat/Gol.Ruang			
4		Jabatan	4		Jabatan			
5		Unit Kerja	5		Unit Kerja			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET					
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA		
1								
1.a								
1.b								
1.c								
2								
2.a								
2.b								

Pejabat Penilai,

Tanah Laut,

Pegawai ASN Yang Dinilai

.....
NIP.

.....
NIP.

S. FORMAT FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN PEGAWAI ASN

NO		I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI	
1		Nama		1	Nama		
2		NIP		2	NIP		
3		Pangkat/Gol.Ruang		3	Pangkat/Gol.Ruang		
4		Jabatan		4	Jabatan		
5		Unit Kerja		5	Unit Kerja		
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/ MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)	
1							
2							
3							

Pejabat Penilai,

 NIP.

Tanah Laut,
 Pegawai ASN Yang Dinilai

 NIP.

T. FORMAT PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA BULANAN PEGAWAI ASN

NO		I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI	
1		Nama		1	Nama		
2		NIP		2	NIP		
3		Pangkat/Gol.Ruang		3	Pangkat/Gol.Ruang		
4		Jabatan		4	Jabatan		
5		Unit Kerja		5	Unit Kerja		
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)	

1

2

Pejabat Penilai,

 NIP.

Tanah Laut,
 Pegawai ASN Yang Dinilai

 NIP.

U. FORMAT FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI ASN

Jangka Waktu Penilaian 02 s.d. 31 Januari 2021

NO	Kegiatan Tugas Jabatan	AK	TARGET				AK	REALISASI				PERHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
1a													
1b													
1c													
2													
2a													
2b													
Nilai Capaian SKP													

Tanah Laut,
Pejabat Penilai,

.....
NIP.

V. FORMAT SURAT IZIN

KOP DINAS

SURAT IZIN

Nomor :

Dasar : a. (1)
b.

Memberikan izin kepada :

Nama :
Alamat :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja : (2)
Untuk : (3)
Terhitung : (4)

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Laut,

NIP.

Keterangan :

- (1) Diisi dengan hal yang menjadi dasar atau pertimbangan izin.
- (2) Diisi unit kerja tempat pegawai yang bersangkutan bertugas.
- (3) Diisi sesuai peruntukan izin.
- (4) Diisi lamanya waktu/terhitung tanggal izin yang dimohon.

Contoh Surat Permintaan Izin

Tanah Laut,
Kepada :
Yth.
(Atasan Langsung)
Di –
Tanah Laut

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permintaan izin :

Tidak masuk kerja selama hari terhitung mulai tanggal s.d.
tanggal.....dikarenakan

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)
NIP.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

A. KLASIFIKASI I

**PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 (KLASIFIKASI I)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	Rp 17.851.106	100%	60%	100%	Rp 46.412.877
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	14	Rp 13.589.784	100%	55%		Rp 21.064.165
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	14	Rp 13.589.784	100%	55%		Rp 21.064.165
4	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	14	Rp 13.589.784	100%	55%		Rp 21.064.165
5	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah	13	Rp 12.196.976	100%	55%		Rp 18.905.313
6	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	13	Rp 12.196.976	100%	55%		Rp 18.905.313
7	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Sekretariat Daerah	13	Rp 12.196.976	100%	55%		Rp 18.905.313
8	Kepala Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	12	Rp 9.752.704	100%	50%		Rp 14.629.057
9	Kepala Bagian Hukum	Bagian Hukum	12	Rp 9.752.704	100%	50%		Rp 14.629.057
10	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	Rp 9.752.704	100%	50%		Rp 14.629.057
11	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	12	Rp 9.752.704	100%	50%		Rp 14.629.057
12	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	12	Rp 9.752.704	100%	50%		Rp 14.629.057
13	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum	12	Rp 9.752.704	100%	50%		Rp 14.629.057
14	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	Rp 9.752.704	100%	50%		Rp 14.629.057
15	Kepala Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	12	Rp 9.752.704	100%	50%		Rp 14.629.057
16	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	Rp 9.752.704	100%	50%		Rp 14.629.057
17	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
18	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
19	Kepala Sub Bagian Aset dan Perlengkapan	Sub Bagian Aset dan Perlengkapan	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
20	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
21	Kepala Sub Bagian Protokol	Kepala Sub Bagian Protokol	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
22	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Pemerintahan	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
23	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Bagian Hukum	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
24	Penyuluh Hukum Muda	Bagian Hukum	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
25	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
27	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
28	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
29	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Organisasi	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
30	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
31	Perencana Muda	Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
32	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	45%		Rp 8.272.732
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
33	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Pemerintahan	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
34	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Bagian Hukum	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
35	Penyuluh Hukum Muda	Bagian Hukum	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
36	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
37	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
38	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
39	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
40	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Organisasi	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
41	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
42	Perencana Muda	Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
43	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
JABATAN FUNGSIONAL								
44	Pranata Komputer Muda	Sekretariat Daerah	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
45	Pranata Komputer Pertama	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
46	Pranata Komputer Penyelia	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
47	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Sekretariat Daerah	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
48	Pranata Komputer Pelaksana	Sekretariat Daerah	6	Rp 3.513.412	95%	10%		Rp 3.689.082
49	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Sekretariat Daerah	5	Rp 2.930.078	95%	10%		Rp 3.076.582
50	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Madya	Sekretariat Daerah	11	Rp 7.540.060	100%	40%	40%	Rp 13.572.107
51	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda	Sekretariat Daerah	9	Rp 5.705.332	100%	40%	40%	Rp 10.269.598
52	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.585.600	100%	40%	40%	Rp 8.254.080
53	Penata Laksana Barang Penyelia	Sekretariat Daerah	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
54	Penata Laksana Barang Mahir	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Daerah	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
JABATAN PELAKSANA								
56	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
57	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	Bagian Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
58	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
59	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	Bagian Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
60	Pengelola Kerjasama dan Investasi	Bagian Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
61	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
62	Pengadministrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
63	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	Bagian Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
64	Pengadministrasi Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
65	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Hukum	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
66	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	Bagian Hukum	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
67	Analisis Hukum	Bagian Hukum	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
68	Analisis Peraturan Administrasi	Bagian Hukum	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
69	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Hukum	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
70	Pengelola Bantuan Hukum	Bagian Hukum	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
71	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	Bagian Hukum	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
72	Pengadministrasi Hukum	Bagian Hukum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
73	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Hukum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
74	Analisis Sosial Budaya	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
75	Analisis Kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
76	Penyusun Data Pendidikan Agama dan Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
77	Pengelola Bantuan Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
78	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
79	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
80	Pengolah Data	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
81	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
82	Pengelola Bimbingan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
83	Pengadministrasi Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Analisis Investasi Daerah	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
85	Penelaah Perkembangan BUMD	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
86	Penyusun Program Pengawasan Perekonomian	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
87	Analisis Pembangunan	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
88	Analisis Ketahanan Ekonomi	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
89	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
90	Pengolah Data Pembinaan Kelembagaan Investasi	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
91	Pengolah Data	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
92	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
93	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
94	Pengadministrasi Umum	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
95	Analisis Fasilitasi Peningkatan Kompetensi	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
96	Analisis Sistem Informasi	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
97	Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
98	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
99	Pranata Kearsipan	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
101	Pengadministrasi Umum	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
102	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
103	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	7	Rp 4.043.106	95%	40%		Rp 5.458.192
104	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	6	Rp 3.513.412	95%	40%		Rp 4.743.106
105	Pengadministrasi Umum	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
106	Analisis Jabatan	Bagian Umum	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
107	Pengelola Teknologi Informasi	Bagian Umum	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
108	Pranata Kearsipan	Bagian Umum	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
109	Pengadministrasi Umum	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
110	Pengadministrasi Persuratan	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
111	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
112	Pramu Bakti	Bagian Umum	1	Rp 938.698	95%	35%		Rp 1.220.307
113	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Bagian Umum	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
114	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Bagian Umum	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
115	Pengelola Bangunan Gedung	Bagian Umum	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
116	Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang	Bagian Umum	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
117	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bagian Umum	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
118	Penata Kendaraan Dinas	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
119	Teknisi Sarana dan Prasarana	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
120	Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
121	Teknisi Listrik dan Jaringan	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
122	Teknisi Peralatan Kantor	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
123	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
124	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
125	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Bagian Umum	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	Penata Kendaraan Dinas	Bagian Umum	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
127	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bagian Umum	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
128	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Bagian Umum	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
129	Ajudan	Bagian Umum	6	Rp 3.513.412	95%	35%		Rp 4.567.435
130	Teknisi Peralatan Kantor	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
131	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
132	Pengadministrasi Umum	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
133	Pengadministrasi Persuratan	Bagian Umum	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
134	Pengemudi	Bagian Umum	3	Rp 1.434.867	95%	35%		Rp 1.865.327
135	Pramu Kebersihan	Bagian Umum	1	Rp 938.698	95%	35%		Rp 1.220.307
136	Analisis Humas	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
137	Analisis Berita	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
138	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
139	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
140	Operator Komputer Grafis	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
141	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
142	Penata Liputan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
143	Teknisi Produksi Multimedia dan Web	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
144	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
145	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
146	Analisis Protokol	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
147	Pranata Acara	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
148	Petugas Protokol	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
149	Pengemudi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	Rp 1.434.867	95%	35%		Rp 1.865.327
150	Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
151	Analisis Kompetensi	Bagian Organisasi	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
152	Analisis Kelembagaan	Bagian Organisasi	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	Analisis Tata Laksana	Bagian Organisasi	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
154	Analisis Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
155	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Bagian Organisasi	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
156	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Bagian Organisasi	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
157	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Bagian Organisasi	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
158	Pengolah Data Kelembagaan	Bagian Organisasi	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
159	Pengelola Tata Naskah	Bagian Organisasi	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
160	Pengolah Data	Bagian Organisasi	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
161	Pengadministrasi Umum	Bagian Organisasi	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
162	Bendahara	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	95%	35%		Rp 5.256.037
163	Analisis Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
164	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
165	Analisis Data dan Informasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
166	Verifikator Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
167	Pengelola Bahan Perencanaan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
168	Pengolah Data Laporan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
169	Pengelola Program dan Laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
170	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
171	Pengadministrasi Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
172	Pengadministrasi Penerimaan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
173	Pengadministrasi Umum	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574

B. KLASIFIKASI II

1. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI II)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Inspektur	Inspektorat	14	Rp 13.589.784	100%	52,5%		Rp 20.724.421
2	Sekretaris	Inspektorat	12	Rp 9.752.704	100%	47,5%		Rp 14.385.239
3	Inspektur Pembantu I	Inspektorat	11	Rp 7.540.060	100%	47,5%		Rp 11.121.588
4	Inspektur Pembantu II	Inspektorat	11	Rp 7.540.060	100%	47,5%		Rp 11.121.588
5	Inspektur Pembantu III	Inspektorat	11	Rp 7.540.060	100%	47,5%		Rp 11.121.588
6	Inspektur Pembantu IV	Inspektorat	11	Rp 7.540.060	100%	47,5%		Rp 11.121.588
7	Inspektur Pembantu V	Inspektorat	11	Rp 7.540.060	100%	47,5%		Rp 11.121.588
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	8	Rp 4.585.600	100%	42,5%		Rp 6.534.480
9	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	8	Rp 4.585.600	100%	42,5%		Rp 6.534.480
10	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	Sub Bagian Administrasi dan Umum	9	Rp 5.705.332	100%	42,5%		Rp 8.130.098
JABATAN FUNGSIONAL								
11	Auditor Madya	Inspektorat	11	Rp 7.540.060	95%	35%	35%	Rp 12.441.098
12	Auditor Muda	Inspektorat	9	Rp 5.705.332	95%	35%	35%	Rp 9.413.798
13	Auditor Pertama	Inspektorat	8	Rp 4.585.600	95%	35%	35%	Rp 7.566.240
14	Auditor Penyelia	Inspektorat	8	Rp 4.585.600	95%	35%	35%	Rp 7.566.240
15	Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektorat	7	Rp 4.043.106	95%	35%	35%	Rp 6.671.124
16	Auditor Pelaksana	Inspektorat	6	Rp 3.513.412	95%	35%	35%	Rp 5.797.129
17	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	Inspektorat	11	Rp 7.540.060	95%	35%	35%	Rp 12.441.098
18	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	Inspektorat	9	Rp 5.705.332	95%	35%	35%	Rp 9.413.798
19	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	Inspektorat	8	Rp 4.585.600	95%	35%	35%	Rp 7.566.240
20	Pranata Komputer Muda	Inspektorat	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
21	Pranata Komputer Pertama	Inspektorat	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
22	Pranata Komputer Penyelia	Inspektorat	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
23	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Inspektorat	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
24	Pranata Komputer Pelaksana	Inspektorat	6	Rp 3.513.412	95%	10%		Rp 3.689.082
25	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Inspektorat	5	Rp 2.930.078	95%	10%		Rp 3.076.582
26	Penata Laksana Barang Penyelia	Inspektorat	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
27	Penata Laksana Barang Mahir	Inspektorat	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
28	Penata Laksana Barang Terampil	Inspektorat	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
JABATAN PELAKSANA								
29	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
30	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
31	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
32	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
34	Analisis Data dan Informasi	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
35	Pengelola Data Rekonsiliasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
36	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
37	Pengelola Data Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
38	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
39	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%	30%		Rp 5.053.882
40	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
41	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
42	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
43	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
44	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
45	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
46	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
47	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	95%	30%		Rp 1.793.583

2. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI II)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	Rp 13.589.784	100%	50%		Rp 20.384.676
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	45%		Rp 14.141.421
3	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
4	Kepala Bidang Akuntansi	Bidang Akuntansi	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
5	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Bidang Penatausahaan Aset	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
6	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
10	Kepala Sub Bidang Anggaran	Sub Bidang Anggaran	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
11	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan	Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
12	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban	Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
13	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas	Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
14	Kepala Sub Bidang Inventarisasi	Sub Bidang Inventarisasi	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
15	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan	Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
16	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan	Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
17	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
18	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Belanja dan Pembiayaan	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Akuntansi	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
20	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
21	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Belanja dan Pembiayaan	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
22	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Akuntansi	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
23	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
JABATAN FUNGSIONAL								
24	Pranata Komputer Muda	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
25	Pranata Komputer Pertama	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
26	Pranata Komputer Penyelia	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
27	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
28	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	Rp 3.513.412	95%	10%		Rp 3.689.082
29	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	Rp 2.930.078	95%	10%		Rp 3.076.582
30	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
31	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
32	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
JABATAN PELAKSANA								
33	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
34	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
35	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
36	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%	30%		Rp 5.053.882

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
38	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
39	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
40	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
41	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
42	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
43	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
44	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
45	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	95%	30%		Rp 1.793.583
46	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
47	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Bidang Belanja dan Pembiayaan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
48	Pengadministrasi Anggaran	Bidang Belanja dan Pembiayaan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
49	Analisis Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
50	Analisis Pembiayaan Daerah	Bidang Belanja dan Pembiayaan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
51	Pengelola Pembiayaan Daerah	Bidang Belanja dan Pembiayaan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
52	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
53	Pengolah Data Perbendaharaan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
54	Pengadministrasi Keuangan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
55	Penata Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Pengelola Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
57	Pengadministrasi Keuangan	Bidang Akuntansi	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
58	Penata Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
59	Pengelola Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
60	Pengolah Data Laporan Kas	Bidang Akuntansi	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
61	Pengadministrasi Keuangan	Bidang Akuntansi	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
62	Analisis Aset Daerah	Bidang Penatausahaan Aset	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
63	Analisis Data dan Informasi	Bidang Penatausahaan Aset	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
64	Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang	Bidang Penatausahaan Aset	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
65	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bidang Penatausahaan Aset	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
66	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Bidang Penatausahaan Aset	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
67	Analisis Standard Harga	Bidang Penatausahaan Aset	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
68	Pengelola Barang Persediaan	Bidang Penatausahaan Aset	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
69	Pengadministrasi Umum	Bidang Penatausahaan Aset	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
70	Analisis Aset Daerah	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
71	Pengelola Data	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
72	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
73	Analisis Aset Daerah	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
74	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
76	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574

3. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI II)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	Rp 13.589.784	100%	50%		Rp 20.384.676
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	45%		Rp 14.141.421
3	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
4	Kepala Bidang Sosial Budaya	Bidang Sosial Budaya	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
6	Kepala Bidang Perencanaan Makro	Bidang Perencanaan Makro	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
7	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
11	Perencana Muda	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
12	Perencana Muda	Bidang Sosial Budaya	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
13	Perencana Muda	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
14	Perencana Muda	Bidang Perencanaan Makro	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
15	Peneliti Muda	Bidang Penelitian dan Pengembangan	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
16	Perencana Muda	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
17	Perencana Muda	Bidang Sosial Budaya	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
18	Perencana Muda	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Perencana Muda	Bidang Perencanaan Makro	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
20	Peneliti Muda	Bidang Penelitian dan Pengembangan	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
JABATAN FUNGSIONAL								
21	Perencana Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
22	Perencana Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
23	Pranata Komputer Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
24	Pranata Komputer Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
25	Pranata Komputer Penyelia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
26	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
27	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	Rp 3.513.412	95%	10%		Rp 3.689.082
28	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Rp 2.930.078	95%	10%		Rp 3.076.582
29	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
30	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
31	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
JABATAN PELAKSANA								
32	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
33	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
34	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
35	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%	30%		Rp 5.053.882
36	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
37	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
39	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
40	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
41	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
42	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
43	Analisis Program Pembangunan Pertanian	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
44	Analisis Kawasan Industri	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
45	Analisis Data Ekonomi Makro	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
46	Penelaah Pengembangan Usaha	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
47	Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
48	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
49	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
50	Pengadministrasi Umum	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
51	Analisis Sosial Budaya	Bidang Sosial Budaya	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
52	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Bidang Sosial Budaya	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
53	Analisis Politik Dalam Negeri	Bidang Sosial Budaya	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
54	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	Bidang Sosial Budaya	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
55	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	Bidang Sosial Budaya	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
56	Pengadministrasi Pemerintahan	Bidang Sosial Budaya	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Pengadministrasi Umum	Bidang Sosial Budaya	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
58	Analisis Infrastruktur	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
59	Analisis Tata Ruang	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
60	Analisis Pengembangan Infrastruktur	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
61	Analisis Pengembangan Wilayah	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
62	Pengolah Data	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
63	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
64	Pengadministrasi Umum	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
65	Analisis Perencanaan	Bidang Perencanaan Makro	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
66	Analisis Pembangunan	Bidang Perencanaan Makro	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
67	Analisis Perencanaan Anggaran	Bidang Perencanaan Makro	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
68	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Bidang Perencanaan Makro	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
69	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Bidang Perencanaan Makro	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
70	Pengelola Bahan Perencanaan	Bidang Perencanaan Makro	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
71	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Bidang Perencanaan Makro	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
72	Pengadministrasi Umum	Bidang Perencanaan Makro	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
73	Analisis Data di Bidang Evaluasi dan Kerjasama Penelitian	Bidang Penelitian dan Pengembangan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
74	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
75	Analisis Penelitian dan Pengembangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Pengelola Rencana Penelitian dan Pengembangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
77	Pengadministrasi Umum	Bidang Penelitian dan Pengembangan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574

4. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI II)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	14	Rp 13.589.784	100%	50%		Rp 20.384.676
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	45%		Rp 14.141.421
3	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
4	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
5	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
8	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah	Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
9	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
10	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
11	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah	Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
12	Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan	Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
13	Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah	Sub Bidang Retribusi Daerah	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
15	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
16	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
17	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
18	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
19	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
JABATAN FUNGSIONAL								
20	Pranata Komputer Muda	Badan Pendapatan Daerah	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Pranata Komputer Pertama	Badan Pendapatan Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
22	Pranata Komputer Penyelia	Badan Pendapatan Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
23	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Pendapatan Daerah	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
24	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Pendapatan Daerah	6	Rp 3.513.412	95%	10%		Rp 3.689.082
25	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Pendapatan Daerah	5	Rp 2.930.078	95%	10%		Rp 3.076.582
26	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Pendapatan Daerah	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
27	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Pendapatan Daerah	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
28	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Pendapatan Daerah	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
JABATAN PELAKSANA								
29	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%	30%		Rp 5.053.882
30	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
31	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
32	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
33	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
34	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
35	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
36	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
37	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
38	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
39	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
40	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
41	Pengadministrasi Umum	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
42	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
43	Pengelola Data Transaksi	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Pengadministrasi Umum	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
45	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
46	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
47	Pengadministrasi Umum	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
48	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
49	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
50	Pengadministrasi Umum	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
51	Analisis Pajak	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
52	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
53	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
54	Analisis Pajak	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
55	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
56	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
57	Analisis Pajak	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
58	Pengolah Data	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
59	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
60	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
61	Pengelola Laporan Data Penerimaan	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
62	Pengelola Pendapatan	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
63	Pengadministrasi Penerimaan	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
65	Pengelola Data Transaksi	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
66	Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
67	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
68	Pengelola Pendapatan	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
69	Pengadministrasian Umum	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

C. KLASIFIKASI III

1. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
3	Kepala Bagian Keuangan	Bagian Keuangan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
7	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bagian Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
10	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Perisalah Legislatif Muda	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
12	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
13	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bagian Keuangan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
15	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
16	Perisalah Legislatif Muda	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
17	Analisis Hukum Muda	Sekretariat DPRD	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
18	Analisis Hukum Pertama	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
19	Pranata Komputer Muda	Sekretariat DPRD	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
20	Pranata Komputer Pertama	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
21	Pranata Komputer Penyelia	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
22	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Sekretariat DPRD	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
23	Pranata Komputer Pelaksana	Sekretariat DPRD	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Sekretariat DPRD	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
25	Penata Laksana Barang Penyelia	Sekretariat DPRD	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
26	Penata Laksana Barang Mahir	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
27	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat DPRD	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
28	Analisis Tata Laksana	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
29	Pengelola Teknologi Informasi	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
30	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
31	Pengadministrasi Umum	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
32	Ajudan	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%	25%		Rp 4.040.424
33	Pramu Bakti	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	1	Rp 938.698	90%	25%		Rp 1.079.502
34	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
35	Analisis Protokol	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
36	Analisis Publikasi	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
37	Pengelola Bangunan Gedung	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
38	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
39	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
40	Operator Mesin	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
41	Teknisi Listrik dan Jaringan	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
42	Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
43	Pengemudi VIP	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%	25%		Rp 3.369.590
44	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
45	Pengadministrasi Umum	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
46	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
47	Pengemudi	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
48	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Bagian Keuangan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Pengelola Bahan Perencanaan	Bagian Keuangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
50	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Bagian Keuangan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
51	Bendahara	Bagian Keuangan	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
52	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Bagian Keuangan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
53	Verifikator Keuangan	Bagian Keuangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
54	Pengelola Perjalanan Dinas	Bagian Keuangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
55	Pengelola Keuangan	Bagian Keuangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
56	Pengelola Laporan Keuangan	Bagian Keuangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
57	Pengelola Program dan Laporan	Bagian Keuangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
58	Pengadministrasi Keuangan	Bagian Keuangan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
59	Pengadministrasi Umum	Bagian Keuangan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
60	Analisis Legislasi	Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
61	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Paerundang-Undangan	Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
62	Notulis Rapat	Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
63	Pranata Jamuan	Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
64	Pengadministrasi Rapat	Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

2. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Mutasi, Data dan Informasi	Bidang Mutasi, Data dan Informasi	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
7	Analisis Kepegawaian Muda	Bidang Mutasi, Data dan Informasi	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Analisis Kepegawaian Muda	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
9	Analisis Kepegawaian Muda	Bidang Mutasi, Data dan Informasi	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
10	Analisis Kepegawaian Muda	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
11	Widyaiswara Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
12	Widyaiswara Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
13	Pranata Komputer Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
14	Pranata Komputer Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Pranata Komputer Penyelia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
16	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
17	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
18	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
19	Arsiparis Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
20	Arsiparis Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
21	Arsiparis Penyelia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
22	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
23	Arsiparis Pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
24	Analisis Kepegawaian Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
25	Analisis Kepegawaian Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
26	Analisis Kepegawaian Penyelia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
27	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
28	Analisis Kepegawaian Pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
29	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
31	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
32	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
33	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
34	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
35	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
36	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
37	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
38	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
39	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
40	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
41	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
42	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
43	Penyusun Rencana Mutasi	Bidang Mutasi, Data dan Informasi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
44	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Bidang Mutasi, Data dan Informasi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Analisis Data dan Informasi	Bidang Mutasi, Data dan Informasi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
46	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Bidang Mutasi, Data dan Informasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
47	Pengelola Disiplin Pegawai	Bidang Mutasi, Data dan Informasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
48	Pengelola Kepegawaian	Bidang Mutasi, Data dan Informasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
49	Pengadministrasi Kepegawaian	Bidang Mutasi, Data dan Informasi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
50	Pengadministrasi Umum	Bidang Mutasi, Data dan Informasi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
51	Penyusun Program Perencanaan Diklat	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
52	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
53	Analisis Pengembangan Karir	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
54	Pengelola Pengembangan Karir	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
55	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
56	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
57	Pengadministrasi Pelatihan	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
58	Pengadministrasi Kepegawaian	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
59	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

3. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional	Bidang Kewaspadaan Nasional	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Politik	Bidang Politik	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
9	Kepala Sub Bidang Bina Ideologi	Sub Bidang Bina Ideologi	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
10	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
11	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
12	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	Sub Bidang Penanganan Konflik	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
13	Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan	Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
14	Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu	Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
15	Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya	Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
16	Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
17	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
18	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Kewaspadaan Nasional	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
19	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Politik	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
20	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
21	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
22	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Kewaspadaan Nasional	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Politik	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
24	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
25	Pranata Komputer Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
26	Pranata Komputer Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
27	Pranata Komputer Penyelia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
28	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
29	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
30	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
31	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
32	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
33	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
34	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
35	Analisis Perencanaan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
36	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
37	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
38	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
39	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
40	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
41	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
42	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
43	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
44	Analisis Kerja Sama	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
45	Pengolah Data	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
46	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
47	Analisis Wawasan Kebangsaan	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
48	Pengolah Data	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
49	Pengadministrasi Umum	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Bidang Kewaspadaan Nasional	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
51	Pengolah Data	Bidang Kewaspadaan Nasional	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
52	Pengadministrasi Umum	Bidang Kewaspadaan Nasional	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
53	Analisis Pengaduan Masyarakat	Bidang Kewaspadaan Nasional	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
54	Pengolah Data	Bidang Kewaspadaan Nasional	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
55	Pengadministrasi Umum	Bidang Kewaspadaan Nasional	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
56	Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Bidang Politik	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
57	Pengelola Pendidikan	Bidang Politik	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
58	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Politik	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
59	Analisis Partai Politik	Bidang Politik	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
60	Pengolah Data	Bidang Politik	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
61	Pengadministrasi Umum	Bidang Politik	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
62	Analisis Kerjasama Kebudayaan	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
63	Pengelola Adat dan Kesenian	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
64	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
65	Analisis Organisasi Masyarakat	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
66	Pengolah Data	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
67	Pengadministrasi Umum	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

4. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Rp 13.589.784	100%	50%		Rp 20.384.676
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	45%		Rp 14.141.421
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
4	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	11	Rp 7.540.060	100%	45%		Rp 10.933.086
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	40%		Rp 6.419.840
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
8	Pranata Komputer Muda	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
9	Pranata Komputer Muda	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
10	Pranata Komputer Muda	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	9	Rp 5.705.332	100%	40%		Rp 7.987.465
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
11	Pranata Komputer Muda	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
12	Pranata Komputer Muda	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
13	Pranata Komputer Muda	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	9	Rp 5.705.332	95%	25%		Rp 6.846.399
JABATAN FUNGSIONAL								
14	Pranata Komputer Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
15	Pranata Komputer Pertama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
17	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
18	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	Rp 3.513.412	95%	10%		Rp 3.689.082
19	Administrator Database Kependudukan Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
20	Administrator Database Kependudukan Pertama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
21	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Rp 5.705.332	95%	10%		Rp 5.990.599
22	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Rp 4.585.600	95%	10%		Rp 4.814.880
23	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Rp 4.043.106	95%	10%		Rp 4.245.261
24	Operator SIAK Penyelia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		#N/A	95%	10%		#N/A
25	Operator SIAK Mahir	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		#N/A	95%	10%		#N/A
26	Operator SIAK Terampil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		#N/A	95%	10%		#N/A
JABATAN PELAKSANA								
27	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%	30%		Rp 5.053.882
28	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
29	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
30	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
31	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
32	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
33	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
34	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
36	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
37	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
38	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
39	Pengolah Data	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
40	Pengelola Mutasi Penduduk	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
41	Pengadministrasi Kependudukan	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
42	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
43	Pengolah Data	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
44	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
45	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
46	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
47	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	7	Rp 4.043.106	95%			Rp 3.840.950
48	Pengelola Teknologi Informasi	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
49	Pengolah Data	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741
50	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	6	Rp 3.513.412	95%			Rp 3.337.741

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Pengadministrasi Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574
52	Pengadministrasi Umum	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	5	Rp 2.930.078	95%			Rp 2.783.574

5. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
10	Kepala UPT Instalasi Farmasi	UPT Instalasi Farmasi	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
12	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan	UPT Laboratorium Kesehatan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
14	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Bidang Kesehatan Masyarakat	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
15	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	Bidang Kesehatan Masyarakat	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
16	Epidemiolog Muda	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
17	Administrator Kesehatan Muda	Bidang Pelayanan Kesehatan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
18	Administrator Kesehatan Muda	Bidang Sumber Daya Kesehatan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
19	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Bidang Kesehatan Masyarakat	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
20	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	Bidang Kesehatan Masyarakat	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
21	Epidemiolog Muda	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
22	Administrator Kesehatan Muda	Bidang Pelayanan Kesehatan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
23	Administrator Kesehatan Muda	Bidang Sumber Daya Kesehatan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
24	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	Dinas Kesehatan	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
25	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Dinas Kesehatan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
26	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
27	Perawat Penyelia	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
28	Perawat Pelaksana Lanjutan	Dinas Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
29	Perawat Pelaksana	Dinas Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
30	Pranata Komputer Muda	Dinas Kesehatan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
31	Pranata Komputer Pertama	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
33	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
34	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
35	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Kesehatan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
36	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
37	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
38	Apoteker Madya	UPT Instalasi Farmasi	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
39	Apoteker Muda	UPT Instalasi Farmasi	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
40	Apoteker Pertama	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
41	Administrator Kesehatan Madya	UPT Instalasi Farmasi	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
42	Administrator Kesehatan Muda	UPT Instalasi Farmasi	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
43	Administrator Kesehatan Pertama	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
44	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	UPT Instalasi Farmasi	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
45	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	UPT Instalasi Farmasi	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
46	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
47	Asisten Apoteker Penyelia	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
48	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	UPT Instalasi Farmasi	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
49	Asisten Apoteker Pelaksana	UPT Instalasi Farmasi	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
50	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	UPT Instalasi Farmasi	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
51	Penata Laksana Barang Penyelia	UPT Instalasi Farmasi	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
52	Penata Laksana Barang Mahir	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
53	Penata Laksana Barang Terampil	UPT Instalasi Farmasi	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
54	Dokter Pertama	UPT Laboratorium Kesehatan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
55	Dokter Muda	UPT Laboratorium Kesehatan	10	Rp 6.558.694	90%	5%		Rp 6.230.759
56	Dokter Madya	UPT Laboratorium Kesehatan	12	Rp 9.752.704	90%	5%		Rp 9.265.069
57	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
58	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	UPT Laboratorium Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
59	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	UPT Laboratorium Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
60	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	UPT Laboratorium Kesehatan	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
61	Sanitarian Madya	UPT Laboratorium Kesehatan	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
62	Sanitarian Muda	UPT Laboratorium Kesehatan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
63	Sanitarian Pertama	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
64	Sanitarian Penyelia	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
65	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	UPT Laboratorium Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
66	Sanitarian Pelaksana	UPT Laboratorium Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
67	Sanitarian Pelaksana Pemula	UPT Laboratorium Kesehatan	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
68	Administrator Kesehatan Madya	UPT Laboratorium Kesehatan	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
69	Administrator Kesehatan Muda	UPT Laboratorium Kesehatan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	Administrator Kesehatan Pertama	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
71	Penata Laksana Barang Penyelia	UPT Laboratorium Kesehatan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
72	Penata Laksana Barang Mahir	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
73	Penata Laksana Barang Terampil	UPT Laboratorium Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
74	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
75	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
76	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
77	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
78	Pengelola Pelaksanaan dan Tinak Lanjut Pemeriksaan Anggaran Pos dan Informatika	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
79	Pengelola Bahan Perencanaan Program Pos dan Informatika	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
80	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
81	Analisis keuangan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
82	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
83	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
84	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
85	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
86	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
87	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
88	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
89	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
90	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
91	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
92	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
93	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
94	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	Bidang Kesehatan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
95	Analisis Gizi	Bidang Kesehatan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
96	Analisis Data dan Informasi	Bidang Kesehatan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
97	Analisis Kesehatan Kerja	Bidang Kesehatan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	Bidang Kesehatan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
99	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	Bidang Kesehatan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
100	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
101	Pengelola Penyehatan Lingkungan	Bidang Kesehatan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
102	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	Bidang Kesehatan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
103	Pengadministrasi Umum	Bidang Kesehatan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
104	Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
105	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
106	Pengelola Program Imunisasi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
107	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
108	Pengelola Penyakit Tidak Menular	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
109	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
110	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
111	Pengadministrasi Umum	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
112	Pengadministrasi Program Pemberantasan Penyakit Menular	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
113	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pelayanan Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
114	Analisis Penilaian dan Akreditasi	Bidang Pelayanan Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
115	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
116	Pengelola Pelayanan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
117	Pengelola Rujukan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
118	Pengelola Dokumen Perizinan	Bidang Pelayanan Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
119	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
120	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pelayanan Kesehatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
121	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelayanan Kesehatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
122	Analisis Data dan Informasi	Bidang Sumber Daya Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
123	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Bidang Sumber Daya Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
124	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Bidang Sumber Daya Kesehatan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
125	Pengelola Kefarmasian	Bidang Sumber Daya Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
127	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Bidang Sumber Daya Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
128	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	Bidang Sumber Daya Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
129	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Sumber Daya Kesehatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
130	Pengadministrasi Umum	Bidang Sumber Daya Kesehatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
131	Pengelola Keuangan	UPT Instalasi Farmasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
132	Pengelola Kepegawaian	UPT Instalasi Farmasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
133	Pengadministrasi Keuangan	UPT Instalasi Farmasi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
134	Pengadministrasi Kepegawaian	UPT Instalasi Farmasi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
135	Pengadministrasi Umum	UPT Instalasi Farmasi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
136	Pengemudi	UPT Instalasi Farmasi	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
137	Pengelola Keuangan	UPT Laboratorium Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
138	Pengelola Kepegawaian	UPT Laboratorium Kesehatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
139	Pengadministrasi Keuangan	UPT Laboratorium Kesehatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
140	Pengadministrasi Kepegawaian	UPT Laboratorium Kesehatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
141	Pengadministrasi Umum	UPT Laboratorium Kesehatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
142	Pengemudi	UPT Laboratorium Kesehatan	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097

6. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	Bidang Pembinaan Kebudayaan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
9	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset	Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
10	Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan PAUD dan PNF	Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan PAUD dan PNF	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
12	Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar	Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
13	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
14	Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama	Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
15	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
16	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
17	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
18	Pamong Budaya Muda	Bidang Pembinaan Kebudayaan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
20	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
21	Pamong Budaya Muda	Bidang Pembinaan Kebudayaan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
22	Pranata Komputer Muda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
23	Pranata Komputer Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
24	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
25	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
26	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
27	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
28	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
29	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
30	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
30	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
31	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
32	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
33	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
34	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
35	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
36	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
37	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
38	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
39	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
40	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
41	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
42	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
43	Pengelola Gaji	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
44	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
46	Penyusun Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
47	Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
48	Pengolah Data	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
49	Pengolah Data	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
50	Pengadministrasi Umum	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
51	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
52	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
53	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
54	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
55	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
56	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
57	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
59	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
60	Analisis Pengembangan Peserta Didik	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
61	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
62	Pengelola Peserta Didik	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
63	Pengolah Data	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
64	Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
65	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
66	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
67	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
68	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
69	Analisis Eksplorasi Cagar Budaya	Bidang Pembinaan Kebudayaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
70	Analisis Budaya	Bidang Pembinaan Kebudayaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
71	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pembinaan Kebudayaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
72	Pengolah Data	Bidang Pembinaan Kebudayaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
73	Pengelola Data Ekspresi Budaya Tradisional	Bidang Pembinaan Kebudayaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
74	Pengelola Data Sejarah	Bidang Pembinaan Kebudayaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
75	Pengelola Adat dan Kesenian	Bidang Pembinaan Kebudayaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
76	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Bidang Pembinaan Kebudayaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
77	Pengadministrasian Kesenian dan Budaya Daerah	Bidang Pembinaan Kebudayaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
78	Juru Pelestari Cagar Budaya	Bidang Pembinaan Kebudayaan	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
79	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
81	Analisis Pengembangan Peserta Didik	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
82	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
83	Pengelola Peserta Didik	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
84	Pengolah Data	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
85	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
86	Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
87	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
88	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
89	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

7. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Kepala UPT Pengelola Objek Wisata Pantai Takisung	UPT Pengelola Objek Wisata Pantai Takisung	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
9	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Destinasi Pariwisata	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
10	Analisis Kebijakan Muda	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Pemasaran Pariwisata	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
12	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Destinasi Pariwisata	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
13	Analisis Kebijakan Muda	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
14	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Pemasaran Pariwisata	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
15	Pranata Komputer Muda	Dinas Pariwisata	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
16	Pranata Komputer Pertama	Dinas Pariwisata	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
17	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Pariwisata	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
18	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Pariwisata	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
19	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Pariwisata	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
20	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Pariwisata	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
21	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Pariwisata	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
22	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Pariwisata	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
23	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Pariwisata	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
24	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
25	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
26	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
27	Pengadministrasi Penerimaan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
29	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
30	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
31	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
32	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
33	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
34	Pengawas Kepariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
35	Analisis Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
36	Pengolah Data	Bidang Destinasi Pariwisata	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
37	Pengelola Informasi Kepariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
38	Pemandu Wisata	Bidang Destinasi Pariwisata	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
39	Pengadministrasi Umum	Bidang Destinasi Pariwisata	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
40	Pengawas Perhotelan	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
41	Analisis Data dan Informasi	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
42	Pengelola Usaha Kepariwisata	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
43	Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
44	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pemasaran Pariwisata	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
45	Pengelola Informasi Kepariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
46	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
47	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
48	Pemandu Wisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
49	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pemasaran Pariwisata	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
50	Bendahara	UPT Pengelola Objek Wisata Pantai Takisung	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
51	Pengadministrasi Umum	UPT Pengelola Objek Wisata Pantai Takisung	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
52	Petugas Keamanan	UPT Pengelola Objek Wisata Pantai Takisung	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097

8. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Kepala UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
10	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
12	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
14	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
16	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kurau	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kurau	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
17	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
18	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
19	Pengawas Bibit Ternak Muda	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Pengawas Bibit Ternak Muda	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
21	Pengawas Mutu Pakan Muda	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
22	Medik Veteriner Muda	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
23	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
24	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
25	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
26	Pengawas Bibit Ternak Muda	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
27	Pengawas Bibit Ternak Muda	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
28	Pengawas Mutu Pakan Muda	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
29	Medik Veteriner Muda	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
30	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
31	Medik Veteriner Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
32	Medik Veteriner Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
33	Medik Veteriner Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
34	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
35	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
36	Pengawas Bibit Ternak Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
37	Pengawas Bibit Ternak Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
38	Pengawas Mutu Pakan Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
39	Pengawas Mutu Pakan Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Pengawas Mutu Pakan Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
41	Paramedik Veteriner Penyelia	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
42	Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
43	Paramedik Veteriner Pelaksana	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
44	Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
45	Pranata Komputer Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
46	Pranata Komputer Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
47	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
48	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
49	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
50	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
51	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
52	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
53	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
54	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
55	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
56	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
57	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
58	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
59	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
60	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
61	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
62	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
63	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
65	Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
66	Penyusun Promosi dan Kerjasama	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
67	Pengelola Database	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
68	Pengelola Usaha Tani Peternakan dan Kehewan	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
69	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
70	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
71	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
72	Pengadministrasi Umum	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
73	Pengawas Mutu Bibit Ternak	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
74	Penyusun Pembinaan dan Pola Pelaksanaan Pengadaan Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
75	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
76	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
77	Pengolah Data	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
78	Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
79	Pengelola Peternakan	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
80	Pengadministrasi Umum	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
81	Analisis Pengawasan Mutu Produk	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
82	Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
84	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
85	Pengelola Pasca Panen	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
86	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
87	Pengelola Usaha Pemotongan Ternak atau Unggas dan Lalu Lintas Daging	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
88	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
89	Pengadministrasi Umum	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
90	Pengelola UPTD Pasar Hewan Dan Rumah Potong Hewan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
91	Pengelola Usaha Pemotongan Ternak atau Unggas dan Lalu Lintas Daging	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
92	Pengadministrasi Penerimaan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
93	Pengadministrasi Umum	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
94	Juru Pungut Retribusi	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
95	Petugas Keamanan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
96	Pramu Kebersihan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	1	Rp 938.698	90%	25%		Rp 1.079.502
97	Pengadministrasi Umum	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
98	Petugas Keamanan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
99	Pramu Kebersihan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	1	Rp 938.698	90%	25%		Rp 1.079.502

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Pengadministrasi Umum	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
101	Petugas Keamanan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
102	Pramu Kebersihan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	1	Rp 938.698	90%	25%		Rp 1.079.502
103	Pengadministrasi Umum	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
104	Petugas Keamanan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
105	Pramu Kebersihan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	1	Rp 938.698	90%	25%		Rp 1.079.502
106	Pengadministrasi Umum	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kurau	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
107	Petugas Keamanan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kurau	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
108	Pramu Kebersihan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kurau	1	Rp 938.698	90%	25%		Rp 1.079.502

9. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Bina Marga	Bidang Bina Marga	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Bidang Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
7	Kepala Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
11	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
13	Teknik Pengairan Muda	Bidang Sumber Daya Air	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
14	Teknik Jalan dan Jembatan Muda	Bidang Bina Marga	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
15	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
16	Penata Ruang Muda	Bidang Tata Ruang	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
17	Penata Ruang Muda	Bidang Pertanahan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
18	Teknik Pengairan Muda	Bidang Sumber Daya Air	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Teknik Jalan dan Jembatan Muda	Bidang Bina Marga	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
20	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
21	Penata Ruang Muda	Bidang Tata Ruang	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
22	Penata Ruang Muda	Bidang Pertanahan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
23	Teknisi Pengairan Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
24	Teknisi Pengairan Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
25	Teknisi Jalan dan Jembatan Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
26	Teknisi Jalan dan Jembatan Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
27	Penata Ruang Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
28	Penata Ruang Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
29	Pranata Komputer Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
30	Pranata Komputer Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
31	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
32	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
33	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
34	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
35	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
36	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
37	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
39	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
40	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
41	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
42	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
43	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
44	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
45	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
46	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
47	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
48	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
49	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
50	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
51	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
52	Analisis Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
53	Pengawas Pengairan	Bidang Sumber Daya Air	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
54	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
55	Pengelola Pengairan	Bidang Sumber Daya Air	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
56	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Teknisi Air	Bidang Sumber Daya Air	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
58	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
59	Pengadministrasi Umum	Bidang Sumber Daya Air	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
60	Pengawas Jalan dan Jembatan	Bidang Bina Marga	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
61	Penyusun Rencana Pengawasan	Bidang Bina Marga	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
62	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Bidang Bina Marga	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
63	Pengelola Pemeliharaan Jalan	Bidang Bina Marga	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
64	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	Bidang Bina Marga	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
65	Pengadministrasi Umum	Bidang Bina Marga	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
66	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
67	Pemeriksa Sanitasi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
68	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
69	Penelaah Mutu Konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
70	Pengolah Data	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
71	Pengelola Jasa Konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
72	Pengadministrasi Umum	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
73	Analisis Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
74	Penyusun Rencana Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
75	Pengawas Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Pengelola Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
77	Pengadministrasi Umum	Bidang Tata Ruang	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
78	Pengemudi	Bidang Tata Ruang	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
79	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Bidang Pertanahan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
80	Pengelola Administrasi Pertanahan Desa atau Kelurahan	Bidang Pertanahan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
81	Pengadministrasi Pertanahan	Bidang Pertanahan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
82	Pengelola Laporan Data Penerimaan	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
83	Pengelola Laboratorium	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
84	Operator Alat Berat	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
85	Teknisi Laboratorium	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
86	Pengadministrasi Umum	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

10. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Tata Kota dan Kebersihan	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
7	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	UPT Laboratorium Lingkungan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan	UPT Laboratorium Lingkungan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
13	Kepala UPTD Kebersihan	UPTD Kebersihan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebersihan	UPTD Kebersihan	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
15	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
16	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
17	Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Bidang Tata Lingkungan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
19	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
20	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
21	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
22	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
23	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
24	Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
25	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Bidang Tata Lingkungan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
26	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
27	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
28	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
29	Pranata Komputer Muda	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
30	Pranata Komputer Pertama	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
31	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
32	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
33	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
34	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
36	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
37	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
38	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
39	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
30	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	UPT Laboratorium Lingkungan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
41	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	UPT Laboratorium Lingkungan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
42	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	UPT Laboratorium Lingkungan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
43	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	UPT Laboratorium Lingkungan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
44	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	UPT Laboratorium Lingkungan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
JABATAN PELAKSANA								
45	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
46	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
47	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
48	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
49	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
50	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
51	Pengadministrasi Penerimaan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
52	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
53	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
55	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
56	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
57	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
58	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
59	Petugas Keamanan	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
60	Pramu Kebersihan	Sekretariat	1	Rp 938.698	90%	25%		Rp 1.079.502
61	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
62	Analisis Penataan Kawasan	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
63	Pengawas Fisik Pemukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
64	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
65	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
66	Juru Survei Permukiman Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
67	Pengadministrasi Umum	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
68	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
69	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
70	Pengawas Tata Pertamanan	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Pengelola Penerangan Jalan	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
72	Pengelola Limbah	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
73	Pengolah Data	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
74	Pemelihara Penerangan Jalan	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
75	Pranata Taman	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
76	Pengadministrasi Umum	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
77	Juru Pungut Retribusi	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
78	Pramu Taman	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	1	Rp 938.698	90%	25%		Rp 1.079.502
79	Analisis Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
80	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Bidang Tata Lingkungan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
81	Pengelola Informasi Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
82	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
83	Penata Gambar	Bidang Tata Lingkungan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
84	Kartografer	Bidang Tata Lingkungan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
85	Pengadministrasi Umum	Bidang Tata Lingkungan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
86	Analisis Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
87	Penelaah Proses di Bidang Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
88	Pengelola Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Pengelola Informasi Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
90	Pengolah Data	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
91	Pengadministrasi Umum	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
92	Analisis Pengaduan Masyarakat	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
93	Analisis Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
94	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
95	Pengelola Pengaduan Publik	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
96	Pengelola Lingkungan	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
97	Pengadministrasi Umum	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
98	Pramu Kebersihan	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	Rp 938.698	90%	25%		Rp 1.079.502
99	Pengolah Data	UPT Laboratorium Lingkungan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
100	Pranata Laboratorium Kearsipan	UPT Laboratorium Lingkungan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
101	Pengadministrasi Umum	UPT Laboratorium Lingkungan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
102	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	UPTD Kebersihan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
103	Pengawas lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	UPTD Kebersihan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
104	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	UPTD Kebersihan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
105	Pengelola Laporan Data Penerimaan	UPTD Kebersihan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
106	Operator Alat Berat	UPTD Kebersihan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	Pengadministrasi Umum	UPTD Kebersihan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
108	Juru Pungut Retribusi	UPTD Kebersihan	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
109	Pramu Kebersihan	UPTD Kebersihan	1	Rp 938.698	90%	25%		Rp 1.079.502

**11. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
8	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	UPT Balai Latihan Kerja	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Latihan Kerja	UPT Balai Latihan Kerja	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
10	Instruktur Muda	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Pengantar Kerja Muda	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
12	Mediator Hubungan Industrial Muda	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
13	Pengantar Kerja Muda	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
14	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Bidang Perindustrian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
15	Instruktur Muda	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
16	Pengantar Kerja Muda	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
17	Mediator Hubungan Industrial Muda	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
18	Pengantar Kerja Muda	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
19	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Bidang Perindustrian	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
20	Pengantar Kerja Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
21	Pengantar Kerja Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
22	Mediator Hubungan Industrial Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Mediator Hubungan Industrial Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
24	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
25	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
26	Pranata Komputer Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
27	Pranata Komputer Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
28	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
29	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
30	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
31	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
32	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
33	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
34	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
35	Instruktur Madya	UPT Balai Latihan Kerja	11	Rp 7.540.060	90%	5%	30%	Rp 9.425.075
36	Instruktur Muda	UPT Balai Latihan Kerja	9	Rp 5.705.332	90%	5%	30%	Rp 7.131.665
37	Instruktur Pertama	UPT Balai Latihan Kerja	8	Rp 4.585.600	90%	5%	30%	Rp 5.732.000
38	Instruktur Penyelia	UPT Balai Latihan Kerja	8	Rp 4.585.600	90%	5%	30%	Rp 5.732.000
39	Instruktur Pelaksana Lanjutan	UPT Balai Latihan Kerja	7	Rp 4.043.106	90%	5%	30%	Rp 5.053.882
40	Instruktur Pelaksana	UPT Balai Latihan Kerja	6	Rp 3.513.412	90%	5%	30%	Rp 4.391.765
41	Penata Laksana Barang Penyelia	UPT Balai Latihan Kerja	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
42	Penata Laksana Barang Mahir	UPT Balai Latihan Kerja	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
43	Penata Laksana Barang Terampil	UPT Balai Latihan Kerja	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
44	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
45	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
46	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
47	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Pengelola Gaji	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
49	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
50	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
51	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
52	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
53	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
54	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
55	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
56	Analisis Bahan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
57	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
58	Analisis Bahan Pengembangan Model Kesempatan Kerja	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
59	Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
60	Pengelola Penempatan TKI	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
61	Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
62	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
63	Analisis Bahan Persyaratan Kerja	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
64	Analisis Bahan Pengupahan	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
65	Analisis Bahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
66	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
67	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
68	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
69	Pengelola Data	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
70	Pengadministrasi Umum	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Analisis Industri	Bidang Perindustrian	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
72	Analisis Fasilitas Litbang Teknologi Industri	Bidang Perindustrian	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
73	Pengolah Data	Bidang Perindustrian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
74	Pengelola Sarana Perindustrian	Bidang Perindustrian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
75	Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Daerah	Bidang Perindustrian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
76	Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Perindustrian	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
77	Pengadministrasian Umum	Bidang Perindustrian	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
78	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	UPT Balai Latihan Kerja	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
79	Pengelola Sarana Kursus dan Pelatihan	UPT Balai Latihan Kerja	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
80	Pengadministrasian Keuangan	UPT Balai Latihan Kerja	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
81	Pengadministrasian Umum	UPT Balai Latihan Kerja	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

12. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Hortikultura	Bidang Hortikultura	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Perkebunan	Bidang Perkebunan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
10	Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
11	Pengawas Benih Tanaman Muda	Bidang Tanaman Pangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
12	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Tanaman Pangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
13	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Bidang Tanaman Pangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
14	Pengawas Benih Tanaman Muda	Bidang Hortikultura	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
15	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Hortikultura	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
16	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Bidang Hortikultura	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
17	Pengawas Benih Tanaman Muda	Bidang Perkebunan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
18	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Perkebunan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Bidang Perkebunan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
20	Penyuluh Pertanian Muda	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
21	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
22	Pengawas Benih Tanaman Muda	Bidang Tanaman Pangan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
23	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Tanaman Pangan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
24	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Bidang Tanaman Pangan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
25	Pengawas Benih Tanaman Muda	Bidang Hortikultura	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
26	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Hortikultura	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
27	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Bidang Hortikultura	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
28	Pengawas Benih Tanaman Muda	Bidang Perkebunan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
29	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Perkebunan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
30	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Bidang Perkebunan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
31	Penyuluh Pertanian Muda	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
32	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
33	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
34	Penyuluh Pertanian Madya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
35	Penyuluh Pertanian Muda	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
36	Penyuluh Pertanian Pertama	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
37	Penyuluh Pertanian Penyelia	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
39	Penyuluh Pertanian Pelaksana	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
40	Pranata Komputer Muda	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
41	Pranata Komputer Pertama	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
42	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
43	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
44	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
45	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
46	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
47	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
48	Penyuluh Pertanian Madya	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
49	Penyuluh Pertanian Muda	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
50	Penyuluh Pertanian Pertama	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
51	Penyuluh Pertanian Penyelia	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
52	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
53	Penyuluh Pertanian Pelaksana	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
54	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
JABATAN PELAKSANA								
55	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
56	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
58	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
59	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
60	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
61	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
62	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
63	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
64	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
65	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
66	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
67	Pramu Bakti	Sekretariat	1	Rp 938.698	90%	25%		Rp 1.079.502
68	Analisis Data dan Informasi	Bidang Tanaman Pangan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
69	Analisis Program Pembangunan Pertanian	Bidang Tanaman Pangan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
70	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	Bidang Tanaman Pangan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
71	Pengelola Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-Buahan Serta Sayuran	Bidang Tanaman Pangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
72	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
73	Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
74	Pengadministrasi Sertifikasi Perlindungan Varietas Tanaman	Bidang Tanaman Pangan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
75	Pengadministrasi Umum	Bidang Tanaman Pangan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Analisis Data dan Informasi	Bidang Hortikultura	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
77	Analisis Potensi Budidaya Serealia	Bidang Hortikultura	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
78	Pengelola Data Penilaian Varietas	Bidang Hortikultura	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
79	Pengelola Perencanaan dan Pelaporan Usaha Tani	Bidang Hortikultura	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
80	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	Bidang Hortikultura	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
81	Pengolah Data	Bidang Hortikultura	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
82	Pengadministrasian Koleksi Tumbuhan	Bidang Hortikultura	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
83	Pengadministrasian Umum	Bidang Hortikultura	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
84	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	Bidang Perkebunan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
85	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	Bidang Perkebunan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
86	Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih atau Bibit	Bidang Perkebunan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
87	Pengolah Data	Bidang Perkebunan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
88	Pengelola Data Kelembagaan Benih	Bidang Perkebunan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
89	Pengadministrasian Umum	Bidang Perkebunan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
90	Analisis Data dan Informasi	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
91	Pengawas Pupuk dan Pestisida	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
92	Analisis Lahan Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
93	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
94	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
96	Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
97	Pengadministrasi Umum	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
98	Pengadministrasi Keuangan	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
99	Pengadministrasi Umum	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
100	Petugas Keamanan	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097

13. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
7	Kepala Seksi Lalu Lintas	Seksi Lalu Lintas	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Kepala Seksi Angkutan	Seksi Angkutan	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
9	Kepala Seksi Prasarana	Seksi Prasarana	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
10	Kepala Seksi Keselamatan dan Pengembangan	Seksi Keselamatan dan Pengembangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Kepala UPT Pelabuhan	UPT Pelabuhan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelabuhan	UPT Pelabuhan	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
13	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
15	Kepala UPT Terminal dan Perparkiran	UPT Terminal dan Perparkiran	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
16	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Terminal dan Perparkiran	UPT Terminal dan Perparkiran	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
17	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
18	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Prasarana dan Keselamatan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
19	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
20	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Prasarana dan Keselamatan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
21	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Perhubungan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
22	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Perhubungan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
23	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Perhubungan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
24	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Perhubungan	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
25	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Perhubungan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
26	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Perhubungan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
27	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Perhubungan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
28	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8	Rp 4.585.600	90%	5%	30%	Rp 5.732.000
29	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	7	Rp 4.043.106	90%	5%	30%	Rp 5.053.882
30	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	6	Rp 3.513.412	90%	5%	30%	Rp 4.391.765
31	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	5	Rp 2.930.078	90%	5%	30%	Rp 3.662.598

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN PELAKSANA								
32	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
33	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
34	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
35	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
36	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
37	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
38	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
39	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
40	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
41	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
42	Analisis Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
43	Analisis Teknik Survei Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
44	Penelaah Andalalin	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
45	Pengelola Data Jaringan Lintas Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
46	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
47	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
48	Pengadministrasi LLAJ	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
49	Analisis Angkutan Darat	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
50	Pengevaluasi Pelayanan Angkutan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
51	Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
52	Pengawas dan Pembina Angkutan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
53	Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
54	Teknisi Survei Angkutan Jalan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
55	Teknisi Survei Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
56	Pengadministrasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
57	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
58	Pengelola Sertifikasi Desain Teknis Perlengkapan Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
59	Pengelola Data Alur dan Perambuan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
60	Pengelola Penerangan Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
61	Pengolah Data	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
62	Pemelihara Penerangan Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
64	Analisis Keselamatan Transportasi Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
65	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
66	Pengelola Pengawasan LLAJ	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
67	Pengadministrasi Umum	Bidang Prasarana dan Keselamatan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
68	Pengelola Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	UPT Pelabuhan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
69	Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	UPT Pelabuhan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
70	Pengadministrasi Umum	UPT Pelabuhan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
71	Petugas Keamanan	UPT Pelabuhan	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
72	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
73	Pengelola Data	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
74	Pengadministrasi Umum	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
75	Petugas Keamanan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
76	Pengawas Angkutan dan Terminal	UPT Terminal dan Perparkiran	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
77	Pengelola Perparkiran	UPT Terminal dan Perparkiran	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
78	Pengadministrasi Karcis	UPT Terminal dan Perparkiran	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
79	Pengadministrasi Umum	UPT Terminal dan Perparkiran	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
80	Petugas Keamanan	UPT Terminal dan Perparkiran	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097

14. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Komunikasi	Bidang Komunikasi	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Bidang Penyelenggaraan E-Government	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Bidang Statistik dan Persandian	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
8	Kepala Seksi Pengelolaan Statistik	Seksi Pengelolaan Statistik	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi	Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
10	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Bidang Komunikasi	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Pranata Komputer Muda	Bidang Penyelenggaraan E-Government	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
12	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Bidang Komunikasi	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
13	Pranata Komputer Muda	Bidang Penyelenggaraan E-Government	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
14	Pranata Komputer Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
15	Pranata Komputer Pertama	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
16	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
17	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
18	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
19	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
20	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
21	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
22	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
23	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
24	Sandiman Penyelia	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
25	Sandiman Pelaksana Lanjutan	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
26	Sandiman Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
27	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
28	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
29	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
30	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
32	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
33	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
34	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
35	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
36	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
37	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
38	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
39	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
40	Pengawas Telekomunikasi	Bidang Komunikasi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
41	Analisis Publikasi	Bidang Komunikasi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
42	Operator Radio	Bidang Komunikasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
43	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Bidang Komunikasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
44	Pengolah Data	Bidang Komunikasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
45	Jurnalis	Bidang Komunikasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
46	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Komunikasi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
47	Pengawas Teknologi Informasi	Bidang Penyelenggaraan E-Government	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
48	Pengelola Database	Bidang Penyelenggaraan E-Government	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
49	Pengelola Situs atau Web	Bidang Penyelenggaraan E-Government	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
50	Pengelola Sistem dan Jaringan	Bidang Penyelenggaraan E-Government	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
51	Teknisi Jaringan Instalasi	Bidang Penyelenggaraan E-Government	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
52	Teknisi Produksi Multimedia dan Web	Bidang Penyelenggaraan E-Government	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
53	Analisis Statistik	Bidang Statistik dan Persandian	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
54	Pengelola Data Statistik	Bidang Statistik dan Persandian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
55	Pengadministrasi Umum	Bidang Statistik dan Persandian	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
56	Analisis Data dan Informasi	Bidang Statistik dan Persandian	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
57	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Bidang Statistik dan Persandian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
58	Operator Sandi dan Telekomunikasi	Bidang Statistik dan Persandian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

**15. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
10	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
12	Analisis Akuakultur Muda	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
13	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	Bidang Perikanan Tangkap	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
14	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
15	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
16	Analisis Akuakultur Muda	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
17	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	Bidang Perikanan Tangkap	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
18	Pengawas Perikanan Madya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
19	Pengawas Perikanan Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
20	Pengawas Perikanan Pertama	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
21	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
22	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
23	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Pranata Komputer Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
25	Pranata Komputer Pertama	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
26	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
27	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
28	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
29	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
JABATAN PELAKSANA								
30	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
31	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
32	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
33	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
34	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
35	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
36	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
37	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
38	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
39	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
40	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
41	Analisis Pangan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
42	Pengelola Ketahanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
43	Pengelola Pola Pangan Harapan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
44	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
45	Pengadministrasi Umum	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
46	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
47	Analisis Pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
48	Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Pengelola Penganekaragaman Pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
50	Pengadministrasi Umum	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
51	Analisis Perikanan Budidaya	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
52	Analisis Kelautan dan Perikanan	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
53	Pengelola Teknis Perikanan Budidaya	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
54	Pengelola Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
55	Teknisi Perikanan Budidaya	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
56	Teknisi Konservasi Kelautan dan Perikanan	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
57	Analisis Kenelayanan	Bidang Perikanan Tangkap	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
58	Analisis Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Bidang Perikanan Tangkap	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
59	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Bidang Perikanan Tangkap	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
60	Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan	Bidang Perikanan Tangkap	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
61	Pengadministrasi Umum	Bidang Perikanan Tangkap	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

16. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
8	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
12	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
13	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
14	Penggerak Swadaya Masyarakat Madya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
15	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
17	Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Lanjutan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
19	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
20	Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
21	Pranata Komputer Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
22	Pranata Komputer Pertama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
23	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
24	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
25	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
26	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
27	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
28	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
29	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
30	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
31	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
32	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
33	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
34	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
35	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
36	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Pengelola Barang Milik Negara	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
38	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
39	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
40	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
41	Analisis Data dan Informasi	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
42	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
43	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
44	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
45	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
46	Pengadministrasi Umum	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
47	Analisis Penataan Kawasan	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
48	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
49	Penyusun Program Pembinaan Komunitas Adat	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
50	Penyusun Program Pembinaan Lingkungan Budaya	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
51	Pengelola Ketransmigrasian	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
52	Pengolah Data	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
53	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
54	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
55	Pengadministrasi Umum	Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Analisis Data dan Informasi	Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
57	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
58	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
59	Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
60	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
61	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
62	Pengadministrasi Umum	Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

17. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
7	Pekerja Sosial Muda	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Pekerja Sosial Muda	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
9	Pekerja Sosial Muda	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
10	Pekerja Sosial Muda	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
11	Pranata Komputer Muda	Dinas Sosial	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
12	Pranata Komputer Pertama	Dinas Sosial	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
13	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Sosial	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
14	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Sosial	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
15	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Sosial	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Sosial	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
17	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Sosial	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
18	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Sosial	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
21	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
22	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
24	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
26	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
27	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
28	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
29	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
30	Konselor	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
31	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
32	Pengelola Perlindungan Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
33	Pranata Bencana	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
34	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
35	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
36	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
37	Pengadministrasi Umum	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
38	Analisis Pelayanan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
39	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
40	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
41	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
42	Pengelola Data Bantuan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
43	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

18. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Kepemudaan	Bidang Kepemudaan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Keolahragaan	Bidang Keolahragaan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
7	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Kepemudaan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Keolahragaan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
9	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Kepemudaan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
10	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Keolahragaan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
11	Pranata Komputer Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
12	Pranata Komputer Pertama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
13	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
14	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
15	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
16	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
17	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
18	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
19	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
21	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
22	Pengelola Gaji	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
23	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
25	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
26	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
27	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
28	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
29	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
30	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
31	Penyuluh Kepemudaan	Bidang Kepemudaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
32	Analisis Data dan Informasi	Bidang Kepemudaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
33	Analisis Kepemudaan	Bidang Kepemudaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
34	Analisis Pengembangan Infrastruktur	Bidang Kepemudaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
35	Pengolah Data	Bidang Kepemudaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
36	Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	Bidang Kepemudaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
37	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Kepemudaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
38	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Bidang Kepemudaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
39	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Kepemudaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
40	Pengadministrasi Umum	Bidang Kepemudaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
41	Penyuluh Olah Raga	Bidang Keolahragaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
42	Analisis Pengembangan Infrastruktur	Bidang Keolahragaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
43	Analisis Keolahragaan	Bidang Keolahragaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
44	Pengolah Data	Bidang Keolahragaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
45	Pengawas Olah Raga	Bidang Keolahragaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
46	Pelatih Atlet	Bidang Keolahragaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
47	Pengadministrasi Umum	Bidang Keolahragaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

19. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
7	Pustakawan Muda	Bidang Perpustakaan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
8	Arsiparis Muda	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
9	Pustakawan Muda	Bidang Perpustakaan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
10	Arsiparis Muda	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
11	Arsiparis Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
12	Arsiparis Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
13	Arsiparis Pertama	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
14	Arsiparis Penyelia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
15	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
16	Arsiparis Pelaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
17	Pustakawan Penyelia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
18	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
19	Pustakawan Pelaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
20	Pranata Komputer Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
21	Pranata Komputer Pertama	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
22	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
23	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
25	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
26	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
27	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
28	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
29	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
30	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
31	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
32	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
33	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
34	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
35	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
36	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
37	Pengemudi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
38	Analisis Data dan Informasi	Bidang Perpustakaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
39	Penyuluh Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
40	Pengawas Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
41	Pengolah Data	Bidang Perpustakaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
42	Pengelola Pustaka Elektronik	Bidang Perpustakaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
43	Pengelola Bahan Pustaka	Bidang Perpustakaan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
44	Pengadministrasi Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
45	Penyuluh Kearsipan	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
46	Analisis Data dan Informasi	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
47	Pranata Reproduksi Arsip	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
48	Pranata Restorasi Arsip	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Pengelola Dokumentasi	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
50	Jurnalis	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
51	Pranata Kearsipan	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
52	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
53	Pengadministrasi Umum	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

20. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
11	Pranata Komputer Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
12	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
14	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Analisis Kebijakan Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	Rp 6.558.694	90%	5%		Rp 6.230.759
16	Analisis Kebijakan Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
17	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
18	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
19	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
21	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
22	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
23	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
24	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
25	Pengolah Data Laporan Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
26	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
27	Pengadministrasi Penerimaan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
28	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
29	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
31	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
32	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
33	Analisis Data dan Informasi	Bidang Penanaman Modal	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
34	Pengawas Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
35	Pengelola Permodalan dan Investasi	Bidang Penanaman Modal	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
36	Pengolah Data	Bidang Penanaman Modal	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
37	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
38	Pengadministrasi Akses Permodalan	Bidang Penanaman Modal	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
39	Pengadministrasi Umum	Bidang Penanaman Modal	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
40	Analisis Data dan Informasi	Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
41	Pengolah Data	Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
42	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
43	Pengadministrasi Umum	Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
44	Analisis Data dan Informasi	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Pengelola Perizinan	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
46	Pengadministrasi Perizinan	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
47	Analisis Data dan Informasi	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
48	Pengelola Perizinan	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
49	Pengadministrasi Perizinan	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

21. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
8	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
9	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
10	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
12	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
13	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
14	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
15	Pranata Komputer Muda	DP2KBP3A	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
16	Pranata Komputer Pertama	DP2KBP3A	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
20	Pranata Komputer Penyelia	DP2KBP3A	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
21	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	DP2KBP3A	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
22	Pranata Komputer Pelaksana	DP2KBP3A	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
23	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	DP2KBP3A	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
24	Bidan Madya	DP2KBP3A	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
25	Bidan Muda	DP2KBP3A	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Bidan Pertama	DP2KBP3A	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
27	Bidan Penyelia	DP2KBP3A	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
28	Bidan Pelaksana Lanjutan	DP2KBP3A	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
29	Bidan Pelaksana	DP2KBP3A	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
30	Bidan Pelaksana Pemula	DP2KBP3A	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
31	Penata Laksana Barang Penyelia	DP2KBP3A	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
32	Penata Laksana Barang Mahir	DP2KBP3A	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
33	Penata Laksana Barang Terampil	DP2KBP3A	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
34	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
35	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
36	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
37	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
38	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
39	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
40	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
41	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
42	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
43	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
44	Analisis Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
45	Analisis Ketahanan Keluarga	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
46	Analisis Sarana Program Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
47	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
48	Pengolah Data	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
49	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
50	Pengadministrasi Umum	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
51	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
52	Pengawas Kependudukan	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Pengolah Data	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
54	Pengelola Data Pengendalian Masyarakat	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
55	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
56	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
57	Pengadministrasi Kependudukan	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
58	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
59	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
60	Analisis Perlindungan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
61	Pengawas Perempuan dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
62	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
63	Pengolah Data	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
64	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
65	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
66	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
67	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
68	Pengadministrasi Umum	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

22. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrollogian	Bidang Perdagangan dan Kemetrollogian	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Pasar	Bidang Pasar	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SUB KOORDINATOR								
8	Pengawas Koperasi Muda	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Penera Muda	Bidang Perdagangan dan Kemetrollogian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
10	Penyuluh Perindustrian dan Pergadangan Muda	Bidang Perdagangan dan Kemetrollogian	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Penyuluh Perindustrian dan Pergadangan Muda	Bidang Pasar	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN NON SUB KOORDINATOR								
12	Pengawas Koperasi Muda	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
13	Penera Muda	Bidang Perdagangan dan Kemetrollogian	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
14	Penyuluh Perindustrian dan Pergadangan Muda	Bidang Perdagangan dan Kemetrollogian	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
15	Penyuluh Perindustrian dan Pergadangan Muda	Bidang Pasar	9	Rp 5.705.332	95%	15%		Rp 6.275.865
JABATAN FUNGSIONAL								
16	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	11	Rp 7.540.060	90%	5%		Rp 7.163.057
17	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
18	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
19	Pranata Komputer Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
20	Pranata Komputer Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
21	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
22	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
23	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
25	Penera Madya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	11	Rp 7.540.060	90%	5%	30%	Rp 9.425.075
26	Penera Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	9	Rp 5.705.332	90%	5%	30%	Rp 7.131.665
27	Penera Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.585.600	90%	5%	30%	Rp 5.732.000
28	Penera Penyelia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.585.600	90%	5%	30%	Rp 5.732.000
29	Penera Pelaksana Lanjutan (Mahir)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	7	Rp 4.043.106	90%	5%	30%	Rp 5.053.882
30	Penera Pelaksana (Terampil)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	6	Rp 3.513.412	90%	5%	30%	Rp 4.391.765
31	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
32	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
33	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
34	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
35	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
36	Verifikator Anggaran	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
37	Pengadministrasi Penerimaan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
38	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
39	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
40	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
41	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
42	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
43	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
44	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
45	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
46	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
47	Analisis Koperasi	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
48	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil dan Menengah	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
50	Fasilitator Sarana Pemasaran	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
51	Penyuluh Koperasi	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
52	Pranata Koperasi	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
53	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
54	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
55	Pengadministrasi Umum	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
56	Penilai Pelayanan Kemetrologian	Bidang Perdagangan dan Kemetrologian	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
57	Penelaah Pengembangan Usaha	Bidang Perdagangan dan Kemetrologian	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
58	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	Bidang Perdagangan dan Kemetrologian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
59	Pengolah Data	Bidang Perdagangan dan Kemetrologian	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
60	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Perdagangan dan Kemetrologian	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
61	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pasar	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
62	Analisis Pengembangan Pasar	Bidang Pasar	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
63	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	Bidang Pasar	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
64	Pengelola Pasar	Bidang Pasar	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
65	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	Bidang Pasar	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
66	Pengolah Data	Bidang Pasar	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
67	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	Bidang Pasar	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
68	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pasar	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

23. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14	Rp 13.589.784	100%	40%		Rp 19.025.698
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
3	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
4	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
5	Kepala Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	11	Rp 7.540.060	100%	35%		Rp 10.179.080
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
10	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
11	Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
12	Kepala Seksi Pengendalian dan Penindakan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
13	Kepala Seksi Pengamanan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
14	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	9	Rp 5.705.332	100%	30%		Rp 7.416.932
15	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
16	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Bidang Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
17	Kepala Seksi Kedaruratan	Bidang Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.585.600	100%	30%		Rp 5.961.280
JABATAN FUNGSIONAL								
18	Pranata Komputer Muda	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Pranata Komputer Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
20	Pranata Komputer Penyelia	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
21	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
22	Pranata Komputer Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
23	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
24	Polisi Pamong Praja Muda	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
25	Polisi Pamong Praja Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
26	Polisi Pamong Praja Penyelia	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
27	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
28	Polisi Pamong Praja Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
29	Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5	Rp 2.930.078	90%	5%		Rp 2.783.574
30	Pemadam Kebakaran Penyelia	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
31	Pemadam Kebakaran Pelaksana Lanjutan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
32	Pemadam Kebakaran Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
33	Pemadam Kebarakan Pemula	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6	Rp 3.513.412	90%	5%		Rp 3.337.741
34	Penata Laksana Barang Penyelia	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9	Rp 5.705.332	90%	5%		Rp 5.420.065
35	Penata Laksana Barang Mahir	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.585.600	90%	5%		Rp 4.356.320
36	Penata Laksana Barang Terampil	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7	Rp 4.043.106	90%	5%		Rp 3.840.950
JABATAN PELAKSANA								
37	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
39	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
40	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%	25%		Rp 4.649.571
41	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
42	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
43	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
44	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
45	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
46	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
47	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
48	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
49	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
50	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
51	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
52	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
53	Pengadministrasi Umum	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
54	Analisis Penyidikan	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
55	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
56	Pengadministrasi Umum	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
58	Pengolah Data Kebijakan Penindakan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
59	Komandan Petugas Keamanan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
60	Petugas Keamanan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
61	Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
62	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
63	Komandan Petugas Keamanan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
64	Petugas Keamanan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	Rp 1.434.867	90%	25%		Rp 1.650.097
65	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
66	Pengelola Pengawasan	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
67	Pengadministrasi Umum	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
68	Analisis Perlindungan Masyarakat	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
69	Pranata Perlindungan Masyarakat	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
70	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
71	Penyuluh Bencana	Bidang Pemadam Kebakaran	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
72	Pengolah Data	Bidang Pemadam Kebakaran	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071
73	Teknisi Sarana dan Prasarana	Bidang Pemadam Kebakaran	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070
74	Penyuluh Bencana	Bidang Pemadam Kebakaran	7	Rp 4.043.106	90%			Rp 3.638.795
75	Pranata Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	6	Rp 3.513.412	90%			Rp 3.162.071

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemadam Kebakaran	5	Rp 2.930.078	90%			Rp 2.637.070

D. KLASIFIKASI IV

1. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	Rp 12.196.976	100%	35%		Rp 16.465.918
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
3	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
4	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
6	Rescuer Penyelia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.705.332	85%	5%		Rp 5.134.799
7	Rescuer Pelaksana Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.585.600	85%	5%		Rp 4.127.040
8	Rescuer Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 4.043.106	85%	5%		Rp 3.638.795
9	Rescuer Peelaksana Pemula	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.513.412	85%	5%		Rp 3.162.071
10	Pranata Komputer Muda	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
20	Analisis Tata Laksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Bendahara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
22	Verifikator Keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
23	Pengelola Teknologi Informasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Pengadministrasi Keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
25	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
26	Pengadministrasi umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
27	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
28	Analisis Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
29	Pranata Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
30	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.930.078	85%	15%		Rp 2.930.078
31	Analisis Dampak Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
32	Pranata Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
33	Pengelola Data Bantuan Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
34	Pengadministrasi umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
35	Penyusun Rencana Rehabilitasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
36	Pranata Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
37	Pengadministrasi umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

2. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Camat Pelaihari	Kecamatan Pelaihari	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
2	Sekretaris	Kecamatan Pelaihari	11	Rp 7.540.060	100%	30%		Rp 9.802.078
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Pelaihari	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Pelaihari	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Pelaihari	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Pelaihari	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Pelaihari	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Pelaihari	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Pelaihari	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Pelaihari	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

3. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Camat Bajuin	Kecamatan Bajuin	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
2	Sekretaris	Kecamatan Bajuin	11	Rp 7.540.060	100%	30%		Rp 9.802.078
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Bajuin	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Bajuin	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Bajuin	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Bajuin	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Bajuin	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Bajuin	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Bajuin	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

4. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Camat Takisung	Kecamatan Takisung	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
2	Sekretaris	Kecamatan Takisung	11	Rp 7.540.060	100%	30%		Rp 9.802.078
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Takisung	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Takisung	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Takisung	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
6	Kepala Seksi Ketertarikan dan Ketertiban	Kecamatan Takisung	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Takisung	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Takisung	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Takisung	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Takisung	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Takisung	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Takisung	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Takisung	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Takisung	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Takisung	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Takisung	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Takisung	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Takisung	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
24	Pengadministrasi Penerimaan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
25	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
26	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
27	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
28	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
29	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
30	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
31	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
32	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
34	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
35	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
36	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
37	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
38	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
39	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
40	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
41	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
42	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
43	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
44	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
45	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

5. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Camat Panyipatan	Kecamatan Panyipatan	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
2	Sekretaris	Kecamatan Panyipatan	11	Rp 7.540.060	100%	30%		Rp 9.802.078
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Panyipatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Panyipatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Panyipatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Panyipatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

6. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Camat Tambang Ulang	Kecamatan Tambang Ulang	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
2	Sekretaris	Kecamatan Tambang Ulang	11	Rp 7.540.060	100%	30%		Rp 9.802.078
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Tambang Ulang	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Tambang Ulang	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Tambang Ulang	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Tambang Ulang	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Tambang Ulang	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Tambang Ulang	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Tambang Ulang	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Tambang Ulang	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

7. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Camat Bati-Bati	Kecamatan Bati-Bati	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
2	Sekretaris	Kecamatan Bati-Bati	11	Rp 7.540.060	100%	30%		Rp 9.802.078
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Bati-Bati	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Bati-Bati	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Bati-Bati	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Bati-Bati	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Bati-Bati	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Bati-Bati	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Bati-Bati	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Bati-Bati	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Bati-Bati	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

8. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Camat Kurau	Kecamatan Kurau	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
2	Sekretaris	Kecamatan Kurau	11	Rp 7.540.060	100%	30%		Rp 9.802.078
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Kurau	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Kurau	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Kurau	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Kurau	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Kurau	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Kurau	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Kurau	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Kurau	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Kurau	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Kurau	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Kurau	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Kurau	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Kurau	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Kurau	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Kurau	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Kurau	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
25	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
26	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

9. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Camat Bumi Makmur	Kecamatan Bumi Makmur	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
2	Sekretaris	Kecamatan Bumi Makmur	11	Rp 7.540.060	100%	30%		Rp 9.802.078
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Bumi Makmur	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Bumi Makmur	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Bumi Makmur	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Bumi Makmur	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Bumi Makmur	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Bumi Makmur	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
25	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
26	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

10. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Camat Batu Ampar	Kecamatan Batu Ampar	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
2	Sekretaris	Kecamatan Batu Ampar	11	Rp 7.540.060	100%	30%		Rp 9.802.078
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Batu Ampar	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Batu Ampar	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Batu Ampar	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Batu Ampar	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Pendudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

11. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Camat Jorong	Kecamatan Jorong	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
2	Sekretaris	Kecamatan Jorong	11	Rp 7.540.060	100%	30%		Rp 9.802.078
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Jorong	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Jorong	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Jorong	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Jorong	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Jorong	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Jorong	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Jorong	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Jorong	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Jorong	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Jorong	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Jorong	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Jorong	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Jorong	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Jorong	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Jorong	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Jorong	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
28	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
29	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
30	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
31	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
32	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
34	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
35	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
36	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
37	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
38	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
39	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
40	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
41	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
42	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
43	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
44	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

12. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Camat Kintap	Kecamatan Kintap	12	Rp 9.752.704	100%	35%		Rp 13.166.151
2	Sekretaris	Kecamatan Kintap	11	Rp 7.540.060	100%	30%		Rp 9.802.078
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Kintap	9	Rp 5.705.332	100%	20%		Rp 6.846.399
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Kintap	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Kintap	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Kintap	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Kintap	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Kintap	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Kintap	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Kintap	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Kintap	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Kintap	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Kintap	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Kintap	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Kintap	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Kintap	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Kintap	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Kintap	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%	15%		Rp 4.043.106
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
25	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
26	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

13. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN ANGSAU KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Lurah Angsau	Kelurahan Angsau	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
2	Sekretaris	Kelurahan Angsau	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Angsau	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
4	Kepala Seksi Pembangunan	Kelurahan Angsau	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kelurahan Angsau	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
6	Penata Laksana Barang Penyelia	Kelurahan Angsau	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
7	Penata Laksana Barang Mahir	Kelurahan Angsau	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
8	Penata Laksana Barang Terampil	Kelurahan Angsau	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
10	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
11	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
13	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
15	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
16	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
17	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
18	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pembangunan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
20	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
21	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
23	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

14. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Lurah Pelaihari	Kelurahan Pelaihari	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
2	Sekretaris	Kelurahan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
4	Kepala Seksi Pembangunan	Kelurahan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kelurahan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
6	Penata Laksana Barang Penyelia	Kelurahan Pelaihari	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
7	Penata Laksana Barang Mahir	Kelurahan Pelaihari	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
8	Penata Laksana Barang Terampil	Kelurahan Pelaihari	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
10	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
11	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
13	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
15	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
16	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
17	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
18	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pembangunan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
20	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
21	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
23	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

15. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN SARANG HALANG KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Lurah Sarang Halang	Kelurahan Sarang Halang	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
2	Sekretaris	Kelurahan Sarang Halang	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Sarang Halang	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
4	Kepala Seksi Pembangunan	Kelurahan Sarang Halang	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kelurahan Sarang Halang	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
6	Penata Laksana Barang Penyelia	Kelurahan Sarang Halang	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
7	Penata Laksana Barang Mahir	Kelurahan Sarang Halang	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
8	Penata Laksana Barang Terampil	Kelurahan Sarang Halang	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
10	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
11	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
13	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
15	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
16	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
17	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
18	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pembangunan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
20	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
21	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
23	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

16. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN KARANG TARUNA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Lurah Karang Taruna	Kelurahan Karang Taruna	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
2	Sekretaris	Kelurahan Karang Taruna	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Karang Taruna	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
4	Kepala Seksi Pembangunan	Kelurahan Karang Taruna	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kelurahan Karang Taruna	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
6	Penata Laksana Barang Penyelia	Kelurahan Karang Taruna	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
7	Penata Laksana Barang Mahir	Kelurahan Karang Taruna	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
8	Penata Laksana Barang Terampil	Kelurahan Karang Taruna	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
10	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
11	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
13	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
15	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
16	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
17	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
18	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pembangunan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
20	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
21	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
23	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

17. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN PABAHANAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL								
1	Lurah Pabahanan	Kelurahan Pabahanan	9	Rp 5.705.332	100%	25%		Rp 7.131.665
2	Sekretaris	Kelurahan Pabahanan	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Pabahanan	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
4	Kepala Seksi Pembangunan	Kelurahan Pabahanan	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
5	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kelurahan Pabahanan	8	Rp 4.585.600	100%	20%		Rp 5.502.720
JABATAN FUNGSIONAL								
6	Penata Laksana Barang Penyelia	Kelurahan Pabahanan	9	Rp 5.705.332	85%			Rp 4.849.532
7	Penata Laksana Barang Mahir	Kelurahan Pabahanan	8	Rp 4.585.600	85%			Rp 3.897.760
8	Penata Laksana Barang Terampil	Kelurahan Pabahanan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
JABATAN PELAKSANA								
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
10	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
11	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
13	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
15	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemerintahan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
16	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Pemerintahan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
17	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
18	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pembangunan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
20	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566
21	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 4.043.106	85%			Rp 3.436.640
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.513.412	85%			Rp 2.986.400
23	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.930.078	85%			Rp 2.490.566

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA